



LAPORAN LKJIP

2023

**DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Malinau ini dapat tersusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2023. **Laporan ini Memuat Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Capaian Kinerja, Analisis Kinerja dan Realisasi Anggaran.**

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih perlu penyempurnaan, karena itu kami mengharapkan masukan dan saran demi penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi, baik untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman maupun Pemerintah Kabupaten Malinau guna perbaikan program dan kegiatan kedepan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman ini.

Kepala Dinas PU-PR.PERKIM



YOSEP, S.T

NIP. 19700401 200112 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahunan 2023. Penyusunan LKjIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau 2021-2022.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI.....	2
1. Kedudukan.....	3
2. Tugas Pokok.....	3
3. Fungsi.....	3
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	6
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	7
E. SUMBER DAYA MANUSIA.....	8
F. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI.....	10
1. Permasalahan Geografi dan Demografi.....	10
2. Transportasi.....	10
3. Permasalahan Air Minum.....	10
4. Permasalahan Irigasi.....	10
5. Permasalahan Sanitasi.....	11
6. Permasalahan Rumah Layak Huni.....	11
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	12
a. Bagian Awal LKjIP.....	12
b. Bagian Utama LKjIP.....	12
c. Bagian Akhir LKjIP.....	12

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026.....	13
1. Tujuan dan Sasaran.....	13
2. Indikator Kinerja.....	15
3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	16
4. Program.....	17
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	17
C. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.....	18
D. PERJANJIAN KINERJA.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	24
3.1.Pengukuran Kinerja.....	24
3.2.Capaian Kinerja.....	24
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	25
C. REALISASI ANGGARAN.....	83
BAB IV PENUTUP.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Identifikasi dan Analisa Peluang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau.....	4
Tabel 1.2	Identifikasi dan Analisa Ancaman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau.....	4
Tabel 1.3	Kondisi Internal dan Eksternal Dinas.....	5
Tabel 1.4	Aparatur Sipil Berdasarkan Golongan.....	8
Tabel 1.5	Aparatur Sipil Berdasarkan Pendidikan.....	9
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama.....	15
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA 2023.....	18
Tabel 2.4	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.....	20
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	24
Tabel 3.2.	Pengukuran Kinerja 1.....	26
Tabel 3.4.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian 2023.....	26
Tabel 3.5.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	27
Tabel 3.6.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	28
Tabel 3.6.	Pengukuran Kinerja Sasaran Program 1.....	28
Tabel 3.14	Kondisi Jalan Kabupaten Malinau Tahun 2023.....	49
Tabel 3.15	Pencapaian Sasaran 2.....	52
Tabel 3.16	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja 2.....	53
Tabel 3.17	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023.....	53

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	53
Tabel 3.19 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.....	54
Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran Program 2.....	55
Tabel 3.21 Pelayanan Masyarakat	58
Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran 3.....	59
Tabel 3.19Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja dengan Tahun lalu.....	60
Tabel 3.20 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah.....	61
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran Starategis 3.....	62
Tabel 3.22 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.....	61
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Sasaran Program 3.....	61
Tabel 3.27 Pencapaian Sasaran 4.....	65
Tabel 3.28 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir sasaran 4.....	65
Tabel. 3.29 Perandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah.....	66
Tabel 3.28 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.....	66
Tabel 3.29 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.....	67
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Sasaran Program 4.....	68
Tabel 3.31 Pelayanan Masyarakat	69
Tabel. 3.32 Pencapaian Sasaran 5.....	76
Tabel. 3.33 Perbandingan Antara Realisasi KinerjaSerta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	76
Tabel. 3.34 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah.....	77
Tabel 3.35 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.....	77
Tabel. 3,36 Pengukuran Kinerja Sasaran 5.....	78
Tabel 3.37 Capaian Kinerja Sasaran Program 5.....	79
Tabel 3.42 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja.....	84
Tabel 4.1 Pencapaian Indikator Utama	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Posisi Organisasi.....	5
Gambar 1.2 Diagram Apratur Sipil Berdasarkan Golongan.....	8
Gambar 1.2 Diagram Aparatur Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	9
Gambar 3.1 Pembangunan Jalan Pasar Malinau Seberang	32
Gambar 3.2 Pembangunan Jalan Simpang Swadaya RT 13 Menuju Jalan Raja Alam.....	33
Gambar 3.3 Peningkatan Jalan Jembatan Singai Terang Menuju desa Mentarang Baru.....	33
Gambar 3.4 Peningkatan Jalan Eks Inhutani II Logpon Sita Tg Lapang.....	34
Gambar 3.5 Peningkatan Jalan Dalam Desa Long Nawang	34
Gambar 3.6 Peningkatan Jalan Dalam Desa Long Ampung	35
Gambar 3.7 Peningkatan Jalan Kaliamok BBI Tahap 1.....	35
Gambar 3.8 Peningkatan Jalan RT.13 Malinau Kota Tahap III.....	35
Gambar 3.9 Peningkatan Jalan Menuju Kuburan Kristen Malinau Barat.....	36
Gambar 3.10 Peningkatan Jalan Simpang Seluwing (Tower) Tahap II.....	36
Gambar 3.11 Peningkatan Jalan Desa Semenggaris Tahap II.....	37
Gambar 3.12 Peningkatan Jalan Dalam Desa Tanjung Keranjang Tahap II.....	37
Gambar 3.13 Peningkatan Jalan Desa Sentaban Tahap II.....	37
Gambar 3.14 Peningkatan Jalan Desa Long Kemuat	38
Gambar 3.15 Peningkatan Jalan Mantri Anom Malinau Utara TAHAP II.....	38
Gambar 3.16 Peningkatan Jalan dalam Desa Long Uro Menuju Lidung Payau.....	39
Gambar 3.17 Peningkatan Jalan Menuju Puskesmas Sungai Boh.....	39
Gambar 3.18 Peningkatan Jalan menuju Vihara Bodhi.....	39
Gambar 3.19 Peningkatan Jalan Daeng Baka RT.18 Malinau Kota.....	40

Gambar 3.20 Peningkatan Jalan Desa Kelapis.....	40
Gambar 3.21 Peningkatan Jalan Desa Pelita Kanaan.....	41
Gambar 3.22 Peningkatan Jalan Lingkungan II RT 18 (Jl. H.KADIR).....	41
Gambar 3.23 Peningkatan Jalan Kabiran menuju Gereja POS PU GKII Kabiran	41
Gambar 3.24 Peningkatan Jalan Desa Respen	42
Gambar 3.25 Peningkatan Jalan Pemakaman Tionghoa	42
Gambar 3.26 Peningkatan Jalan Desa Pulau Sapi (Simpang GKII-Simpang Kantor Camat)......	43
Gambar 3.27 Peningkatan Jalan Pembangunan I.....	43
Gambar 3.28 Peningkatan Jalan simpang Colombus Malinau Kota.....	44
Gambar 3.29 Peningkatan Jalan Gg. Doremi.....	44
Gambar 3.30 Peningkatan Jalan Desa Setarap - Kantor Camat Masehi.....	44
Gambar 3.31 Peningkatan Jalan RT.1 Menuju RT.17 Malinau Kota.....	45
Gambar 3.32 Peningkatan Jalan Samping SMA 1 Malinau - Jl Imanuel.....	45
Gambar 3.33 Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Malinau.....	45
Gambar 3.34 Rehabilitasi Jalan (Penimbunan/Pemeliharaan) Jalan Tani Semeladung Indah.....	46
Gambar 3.35 Rehabilitasi Jalan (Penimbunan dan Grading Jalan Tani) Menuju Jl. Poros Propinsi.....	46
Gambar 3.36 Penimbunan Jalan 1000 m ³ pada fasilitas umum Desa Tg. Keranjang Kec. Malinau Kota.....	47
Gambar 3.37 Rehabilitasi Jalan (Penimbunan) Jalan GG. Sopoyono RT. 20.....	47
Gambar 3.38 Pembangunan Jembatan Gantung Desa Setarap-Desa Punan Setarap	48
Gambar 3.39 Pemeliharaan Jembatan Malinau	48
Gambar 3.40 Rehabilitasi Jembatan Gantung Pulau Sapi	48
Gambar 3.41 Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal Kec. Malinau Kota	56
Gambar 3.42 Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal Kec. Malinau Barat	56
Gambar 3.41 Renovasi Rumah Tidak Layak Huni	62
Gambar 3.46 Pembangunan Jaringan Air Bersih sengayan.....	70
Gambar 3.47 Pembangunan Jaringan Air Bersih (SPAM) Kabiran	70

Gambar 3.48 Pengembangan Jaringan Pembangunan Jaringan Air Bersih belakang Christian Center.....	70
Gambar 3.49 Pembangunan jaringan air minum desa sesua RT 3.....	71
Gambar 3.50 Pembangunan Jaringan Air Bersih Jl. Poros Tanjung Lapang, RT. 2.....	71
Gambar 3.51 Rehab IPA Kuala Lapang.....	72
Gambar 3.52 Pembangunan Air Bersih (SPAM) Desa Long Aran.....	72
Gambar 3.53 Pembangunan IPA Tanjung Nanga.....	72
Gambar 3.54 Pemasangan Jaringan PDAM di Jalan Swadaya Lidung Keminci.....	73
Gambar 3.55 Revitalisasi IPA PDAM Kuala Lapang.....	73
Gambar 3.56 Pembangunan Air Bersih (SPAM) Dusun Rajuk RT. 4 Desa Paking.....	74
Gambar 3.57 Pembangunan Jaringan Irigasi Kuala Lapang.....	76
Gambar 3.58 Pembangunan Jaringan Irigasi Malinau Seberang.....	80
Gambar 3.59 Pembangunan Jaringan Irigasi Tanjung Lapang.....	80

BAB I

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 43 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau merupakan salah satu dari 54 Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Dinas PUPRKIM Kabupaten Malinau merupakan Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pembangunan di bidang infrastruktur dalam mendukung 5 (lima) Bidang Prioritas yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Malinau. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau memperhatikan keseimbangan berbagai aspek lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat Malinaui, dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka Dinas PUPRKIM Kabupaten Malinau beserta jajarannya telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PUPRKIM Kabupaten Malinau Periode Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Malinau.

LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang telah ditetapkan di awal tahun dan dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang, dan UPTD di lingkungan Dinas PUPR-PERKIM Kabupaten Malinau juga merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP memiliki manfaat yang sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan anggaran, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan/capaian pelaksanaan program/kegiatan terhadap Target Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dengan mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau di Pasal 4 disebutkan bahwa Susunan Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau merupakan Sekretariat DPRD Tipe C, Inspektorat Daerah Kabupaten Malinau merupakan Inspektorat Tipe A, Badan Daerah, Lembaga dengan fungsi penunjang lain, Kecamatan dan Dinas Daerah Kabupaten Malinau. Dinas Daerah yang dimaksud diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPU-PR.PERKIM) Kabupaten Malinau adalah Tipe A, bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan. Adapun kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1. KEDUDUKAN

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. TUGAS POKOK

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Tata Ruang, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

3. FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 217 menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam mengemban misinya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Karena itu perlu dianalisis semua peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau. Bila peluang dan ancaman dapat diidentifikasi dan diantisipasi dengan baik maka akan menjadi potensi yang mendorong pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, namun sebaliknya jika peluang dan ancaman tidak teridentifikasi dan diantisipasi dengan baik akan menjadi penghambat bahkan mungkin dapat menggagalkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Faktor yang menjadi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Identifikasi dan Analisa Peluang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Adanya kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam NAWACITA yang memprioritaskan pembangunan kawasan perbatasan	20	5	1,00
2	Kuatnya komitmen Kepala Daerah terhadap pembangunan prasarana dasar infrastruktur wilayah	20	5	1,00
3	Kuatnya motivasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan	15	5	0,75
4	Tersedianya berbagai sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan	15	4	0,60
5	Tersedianya system LPSE yang mempermudah dan mempercepat proses pengadaan Penyedia Jasa/Rekanan	15	3	0,45
6	Tersedianya material lokal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur wilayah	15	4	0,60
	TOTAL	100		4,40

Tabel 1.2
Identifikasi dan Analisa Ancaman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Luasnya Wilayah Kabupaten Malinau dengan topografi yang relative berat	20	5	1,00
2	Terbatasnya moda transportasi pada kawasan perbatasan dan pedalaman yang menyebabkan tingginya biaya pembangunan	20	5	0,80
3	Terbatasnya areal pembangunan karna sebagian besar wilayah Malinau masuk dalam kawasan lindung dan KBK (Kawasan Budidaya Kehutanan)	15	4	0,60
4	Terbatasnya kapasitas Penyedia Jasa Lokal (SDM dan Peralatan)	15	4	0,60
5	Terbatasnya suplay material pabrikasi	15	5	0,75
6	Belum terpadunya perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah	15	5	0,75
	TOTAL	100		4,50

Dari analisa identifikasi kondisi internal dan eksternal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau maka dapat diketahui titik keseimbangan organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Kondisi Internal dan Eksternal Dinas

FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
Indikator	Skor Tertimbang	Indikator	Skor Tertimbang
Kekuatan	4,10	Peluang	4,40
Kelemahan	3,85	Ancaman	4,50
Keseimbangan	0,25	Keseimbangan	- 0,10

Pada Diagram Keseimbangan dapat digambarkan posisi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Diagram Posisi Organisasi



Kesimpulan Hasil Analisa Lingkungan Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau berada pada nilai kekuatan positif namun sekaligus juga berhadapan dengan ancaman yang relative tinggi, sehingga oleh karenanya strategi organisasi yang perlu diambil adalah **Strategi Diversifikasi**.

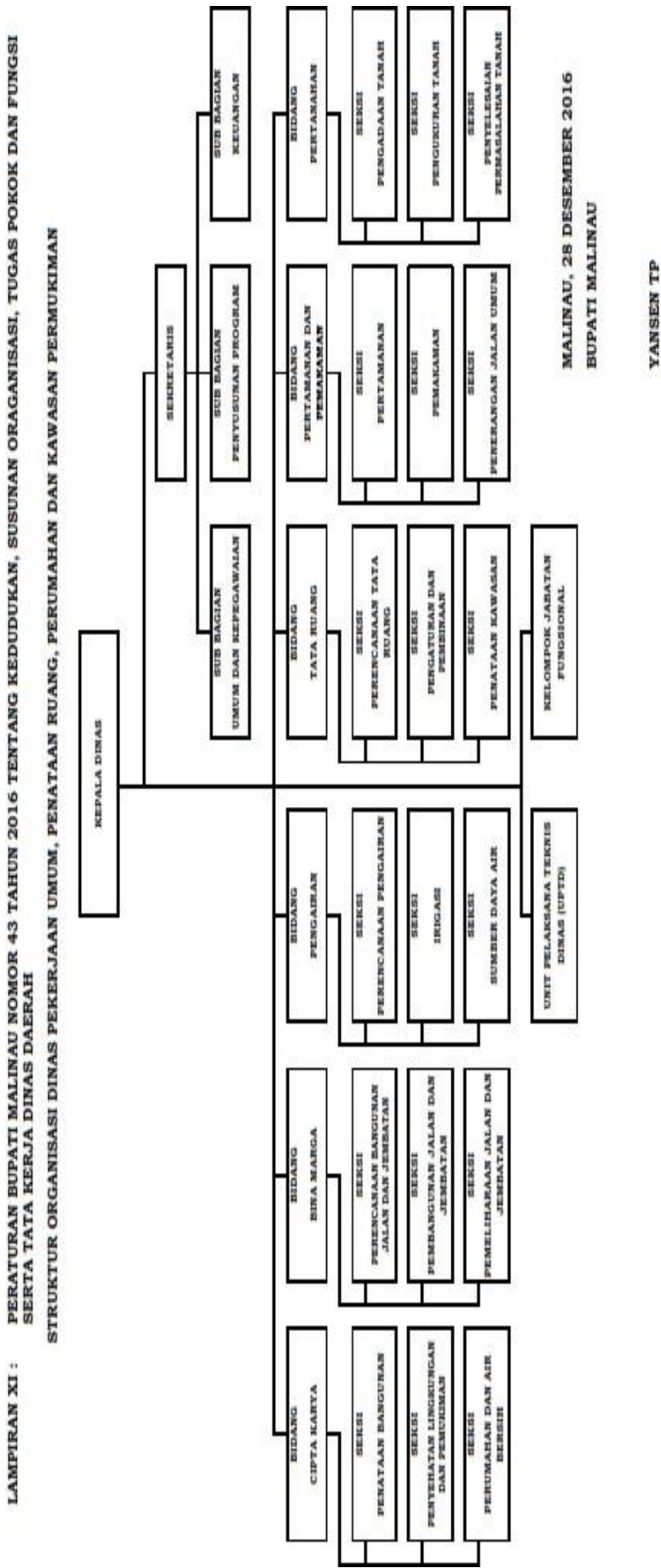
D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 diuraikan Susunan Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau sebagai berikut dengan bagan struktur organisasi :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Cipta Karya
4. Bidang Bina Marga
5. Bidang Sumber Daya Air
6. Bidang Tata Ruang
7. Bidang Pertamanan dan Pemakaman
8. Bidang Pertanahan
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau terdapat pada lampiran

1.1 Struktur Organisasi

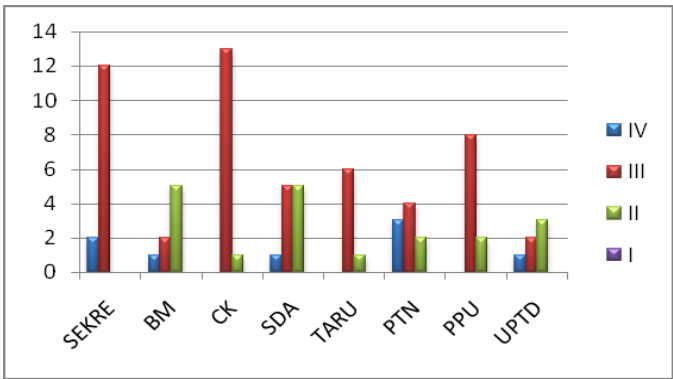


E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau per 31 Desember 2023, memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 302 (tiga ratus dua) orang yang terdiri dari 85 (seratus lima) orang PNS, 1 (satu) orang PTT (Pegawai Tidak Tetap), dan 82 (delapan puluh dua) staf pelaksana kegiatan / Honor Proyek dan Tenaga Lapangan UPTD, dan 135 (seratus tiga puluh lima) Tenaga Lapangan, Pertamanan dan Pemakaman.

Tabel 1.4 Aparatur Sipil Berdasarkan Golongan

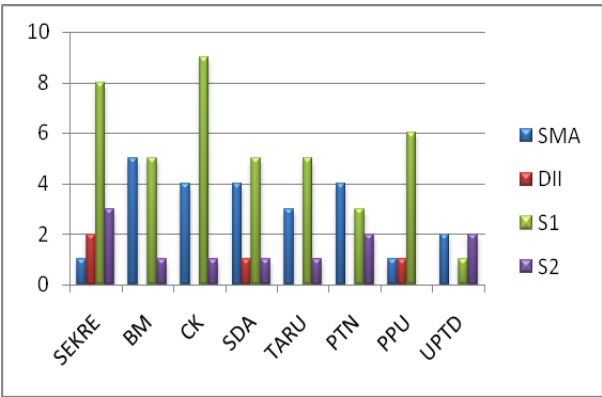
No	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1.	KEPALA DINAS	1				1
2.	SEKRETARIAT	1	11			13
3.	BIDANG BINA MARGA	1	5	5		11
4.	BIDANG CIPTA KARYA		10	1		14
5.	BIDANG SUMBER DAYA AIR	1	5	5		11
6.	BIDANG PENATAAN RUANG		6	3		9
7.	BIDANG PERTANAHAN	1	4	2		9
8.	BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN UMUM	2	8			8
9.	UPTD	1	2	2		5
	JUMLAH	8	50	18		77



Gambar 1.2 Diagram Apratur Sipil Berdasarkan Golongan

Tabel 1.5 Aparatur Sipil Berdasarkan Pendidikan

No	UNIT KERJA	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SLTA	D3	S1	S2	S3	
1.	KEPALA DINAS				1		1
2.	SEKRETARIAT	2	2	7	2		13
3.	BIDANG BINA MARGA	4		4	1		11
4.	BIDANG CIPTA KARYA	4		9	1		14
5.	BIDANG SUMBER DAYA AIR	3	1	5	1		10
6.	BIDANG PENATAAN RUANG	3		5	1		9
7.	BIDANG PERTANAHAN	5		4	2		10
8.	BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN UMUM	1	1	5			7
9.	UPTD	1		1	2		4
	JUMLAH	23	4	40	9		77



Gambar 1.3 Diagram Aparatur Sipil Bedasarkan Kualifikasi Pendidikan

F. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI

1. Permasalahan Geografi dan Demografi

Wilayah Kabupaten Malinau sangat luas dan sebagian besar merupakan kawasan hutan, dataran dengan aliran sungai, daerah pegunungan, dan kawasan perbatasan. Permasalahan utama yang harus diatasi adalah ketertinggalan dan keterisolasian masyarakat desa yang tinggal di daerah pedalaman, pegunungan dan perbatasan; serta kesenjangan antardesa.

2. Transportasi

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi sangat penting untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang baik antardesa, antarkecamatan antarkabupaten dan antarnegara. Transportasi di Kabupaten Malinau mencakup pengembangan transportasi darat, sungai, laut dan udara. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya jalan beraspal dibanding keseluruhan panjang jalan, dan sebagian besar jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Hal ini menyebabkankurang lancarnya lalu lintas penduduk dan barang antardesa dan antarkecamatan. Selain itu,Pembangunan jalan Negara dan jalam provinsi realisasinya selama lima tahun terakhir masih sangat kecilbila dibandingkan dengan total jalan yang dibutuhkan untuk dibangun. Kondisi ini menyiratkan kurangnya perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan di Kabupaten Malinau. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya transportasi darat yang menghubungkan antardesa dan antarkecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara pusat-pusat produksi dan pusat-pusat perdagangan dan pemasaran.

3. Permasalahan Air Minum

Permasalahan Air Minum Ketersediaan air bersih merupakan salah satu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Perkembangan rumah tangga menurut sumber air minum di Kabupaten Malinau menunjukkan adanya perbaikan terhadap akses air bersih.Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah belum optimalnya pengelolaan sumber air baku dan terbatasnya jaringan air bersih yang murah dan terjangkau terutama bagi masyarakatyang tinggal di daerah pedalaman dan kawasan perbatasan.

4. Permasalahan Irigasi

Perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan pangan juga semakin bertambah. Hasil pasokan kebutuhan pangan saat ini hanya mengandalkan pertanian yang bersumber dari air permukaan. Luas potensial lahan irigasi saat ini pun sangat terbatas sehingga diperlukan suatu solusi untuk mendukung permasalahan tersebut.

Salah satu arahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam pemantapan ketahanan pangan dari sektor irigasi, yaitu dengan pengelolaan lahan rawa yang berkelanjutan. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah belum optimalnya penanganan irigasi untuk lahan pertanian bagi masyarkat petani di kabupaten malinau.

5. **Permasalahan Sanitasi**

Sanitasi berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dalam aspek air bersih dan sarana pembuangan sampah. Banyak penyakit yang disebabkan oleh buruknya sanitasi sehingga akses sanitasi layak menjadi salah satu hak asasi manusia yang wajib didapatkan oleh setiap warga masyarakat. Permasalahan yang harus diatasi untuk lima tahun kedepan tidak adanya data yang memadai tentang ketersediaan sanitasi di wilayah perdesaan dan masih belum tersedianya IPLT yang merupakan instalasi pengelolaan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil truk tinja.

6. **Permasalahan Rumah Layak Huni**

Salah satu infrastruktur yang terpenting pada suatu lokasi adalah memiliki jalan yang memadai. Kondisi kawasan padat penduduk merupakan permasalahan yang sering timbul di Kabupaten Malinau. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah masalah relokasi rumah korban bencana. Banyaknya penduduk yang tinggal di kawasan pinggiran sungai menyebabkan sangat perlunya bantuan penanganan masalah infrastruktur di kawasan tersebut. Permasalahan yang harus di atasi lima tahun kedepan melakukan perencanaan pembangunan atau bantuan rehab rumah korban bencana yang terpadu tentu memerlukan survey akan data perumahan tersebut. Berdasarkan hasil survey dan observasi di lapangan, didapatkan bahwa infrastruktur rumah korban bencana yang sudah ada membutuhkan peningkatan, perbaikan dan pembuatan yang baru.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian laporan kinerja ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

A. Bagian Awal LKjIP

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman kata pengantar,halaman daftar isi, halaman daftar table dan halaman daftar gambar.

B. Bagian Utama LKjIP

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, dasar pembentukan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, aspek strategi organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, permasalahan utama yang dihadapi organisasi dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini terdiri dari :

1. Rencana Strategis 2021 – 2026 yang berisi tentang tujuan dan sasaran, indikator kinerja, strategi dan arah kebijakan serta program – program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dilaksanakan selama 5 tahun;
2. Rencana Kinerja Tahunan yang berisi tentang sasaran strategis, indikator Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan target kinerja selama 1 tahun anggaran pelaksanaan;
3. Perjanjian Kinerja yang berisi tentang janji kerja oleh seluruh pejabat eselon, baik eselon 2, 3, maupun eselon 4 terhadap seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini terdiri dari pengukuran kinerja, gambaran hasil capaian kinerja dan analisa. Baik dari secara kualitatif, kuantitatif dan statistik, serta pembahasan hasil capaian kinerja berikut realisasi anggaran yang digunakan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.

Bagian Akhir LKjIP

Bagian akhir dari laporan ini berisi tentang daftar lampiran.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau yang mencakup Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan, serta Program Kerja baik program utama maupun program pendukung yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pada hasil identifikasi dan analisis lingkungan tersebut, maka tujuan adalah suatu target yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta berdasarkan isu-isu dan analisis stratejik. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Malinau seperti yang diuraikan di bawah ini :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan konektivitas infrastruktur jalan dan jembatan untuk pemerataan ekonomi	Meningkatnya infrastruktur jalan jembatan baik di perkotaan maupun perbatasan	➤ Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	10,07%	15%	20 %	25%	30%	35%
2.	Mewujudkan peningkatan Infrastruktur Permukiman yang Layak	Meningkatnya akses terhadap fasilitas sanitasi layak	➤ Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	20%	40%	60%	80%	100%
3.	Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan	Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh	➤ Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,75%	8%	8,25%	8,50%	8,75%	9%
4.	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Air Minum Bagi Masyarakat	Meningkatnya infrastruktur sumber air minum layak	➤ Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	0,80%	0,20%	40%	60%	80%	100%
5.	Meningkatkan Infrastruktur Irigasi Sebagai Dukungan Ketahanan Air Bagi Pertanian	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi	➤ Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,34%	0,34%	0,56%	0,79%	1,13%	2,27%

1. INDIKATOR KINERJA

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA
1	Mewujudkan konektivitas infrastruktur jalan dan jembatan untuk pemerataan ekonomi	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Total Panjang jalan}} \times 100\%$
2	Mewujudkan peningkatan infrastruktur Permukiman yang layak	Meningkatnya akses terhadap fasilitas sanitasi layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi didalam sebuah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut}} \times 100\%$
3.	Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan	Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kab/kota}} \times 100\%$
4.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum bagi masyarakat	Meningkatnya Infrastruktur air minum layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cupluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten A}} \times 100\%$
5.	Meningkatkan infrastruktur irigasi sebagai dukungan ketahanan pangan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi	Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$

2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintah Yang Profesional			
MISI III : Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Konektivitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan	- Meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui - pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan - Membangun jalan sesuai perencanaan dan skala prioritas daerah - Survey kondisi jalan secara rutin - Meningkatkan kualitas jalan melalui peningkatan dan pemeliharaan jalan	- Meningkatkan ketersediaan dan layanan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kawasan strategis - Kualitas jalan dengan kondisi mantap - Memudahkan mobilitas masyarakat
2. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman yang Layak	Meningkatnya akses terhadap permukiman yang layak	Ketersediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Meningkatkan ketersediaan dan layanan Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tanggadi seluruh kabupaten.
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan	Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh	Ketersediaan lingkungan sehat dan hunian yang layak untuk kawasan kumuh	- Melaksanakan penyusunan database rumah tidak layak huni (RTLH), pengurangan jumlah RTLH - Penuntasan kawasan kumuh, Pembangunan PSU dan Pengelolaan pemeliharaan PSU Pemukiman yang menjadi asset pemda
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Air Minum Bagi Masyarakat	Meningkatnya infrastruktur sumber air minum layak	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional yang terintegrasi untuk pemenuhan cakupan air minum yang layak	Meningkatkan kapasitas penyediaan sistem air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

5. meningkatkan Infrastruktur Irigasi Sebagai Dukungan Ketahanan Air Bagi Pertanian	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi	● Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi Kewenangan kabupaten ● Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kondisi sarana dan prasarana jaringan irigasi ● Kerjasama dan manajemen aset dalam pengelolaan SDA	● Pelaksanaan pembangunan infrastruktur saluran irigasi dan prasarana sumber daya air yang memadai
---	---	--	--

PROGRAM

Program kerja merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Dan selain itu program kerja sendiri juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan, dan hasilnya akan dievaluasi pada masa akhir tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berikut program – program yang diakomodir oleh Dinas PUPR – PERKIM pada tahun 2023:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
9. Program Penyelenggaraan Jalan
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
11. Program Kawasan Permukiman
12. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampah Regional
13. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan penjabaran sasaran dan indikator kinerja secara Strategik dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Raja Pandita RT.10 No.95 (0553) 21278 Malinau 77554

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	20
2.	Meningkatnya akses terhadap Permukiman yang layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	40
3.	Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	8,25
4.	Meningkatnya Infrastruktur air minum layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	40
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,56

Malinau, 03 Februari 2023

Kepala Dinas,

YOSEP.S.T
Pembina IV/a
NIP. 19700401 200112 1 002

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil- hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MALINAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik(%)	20 %
2	Meningkatnya akses terhadap fasilitas sanitasi layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	40 %
3	Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,25 %
4	Meningkatnya infrastruktur sumber air minum layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	40 %
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,56 %

No	Program	Anggaran		Ket.
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 106.042.925.740,00	Rp. 110.792.801.638,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 117.578.962.999,00	Rp. 121.490.273.030,00	APBD
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 25.099.929.152,00	Rp. 26.625.380.183,00	APBD
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 199.999.939,00	Rp. 298.337.939,00	APBD
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 1.549.987.600,00	Rp. 1.881.765.600,00	APBD
6	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 62.580.187.107,00	Rp. 68.277.488.997,00	APBD
7	Program Pengembangan Permukiman	Rp 55.140.866.148,00	Rp. 57.554.998.535,00	APBD
8	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	APBD
9	Program Kawasan Permukiman	Rp. 3.200.000.000,00	Rp. 3.380.058.000,00	APBD
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 25.703.278.257,00	Rp. 26.617.122.157,00	APBD

11	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 5.522.862.619,00	Rp. 5.819.330.619,00	APBD
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.724.952.282,00	Rp. 1.724.952.282,00	APBD
TOTAL		Rp. 404.577.415.843.00	Rp. 424.712.508.980,00	

Malinau, 23 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Bupati Malinau



WEMPI W. MAWA, SE., M.H

Pihak Pertama,
Kepala Dinas PUPR-PERKIM



YOSEP, ST., M.M.T
NIP. 197004012001121002

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir periode instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dalam semangat transparansi seperti itulah, Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karekteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja serta hasil evaluasi Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Malinau. Dinas PUPR-PERKIM telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Intervasi Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPR-PERKIM dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	20%	22,90%	114,28%
2	Meningkatnya infrastruktur sumber air minum layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	40%	74,98%	187,45%
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	0,56	49,06%	87,61%
4	Meningkatnya infrastruktur akses sanitasi layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	40%	81,41%	203.625%
5.	Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,25%	2,36%	28,6%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan pertanggung jawaban Kepala Dinas dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Tujuan : *Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar*

Pengukuran Tujuan Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau memiliki 5 (lima) Sasaran dengan 5 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA I

Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan

Tabel. 3.3
Pengukuran Kinerja 1

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian
		Target	Realisasi	
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Persentase	20%	22,90%	114,28%

Sumber: Bidang Bina Marga

Dari Tabel diatas dapat dilihat hasil meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan tahun 2023, bahwa Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Bina Marga memperoleh capaian persentase panjang jalan dalam kondisi baik Tahun 2023 adalah 114,28%. Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahunan 2023 dengan tahun sebelumnya dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel. 3.4
Perbandingan Antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun....		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Persentase	22,90%	49,7%	45,10%	12,16%	4,08%	3,70%	24,32%

Sumber: Bidang Bina Marga

Perbandingan realisasi serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya adalah perbandingan nilai evaluasi tahun 2023 sebesar 22,90% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 12,16% atau realisasi capaian kinerja sebesar 24,32% dan realisasi tahun 2021 sebesar 45,10% atau realisasi capaian kinerja sebesar 3,70% Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 32,94% terhadap capaian tahun 2021. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel. 3.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Persentase	22.83%	35 %	65,22%

Sumber: Bidang Bina Marga

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan nilai evaluasi tahun 2023 sebesar 22,83% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 35% Maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 persentase capaian nilai evaluasi sebesar 65,22% Terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

Tabel. 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
SS-1 Meningkatnya infrastruktur jalan baik di perkotaan maupun perdesaan					
IKSS	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	20%	22.83%	114.15%
SP Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan baik di perkotaan maupun perdesaan					
IKSP-1	Persentase jalan yang dibangun	%	100	100%	100%
IKSP-2	Persentase jalan yang ditingkatkan	%	100	100%	100%
IKSP-3	Persentase jalan yang dipelihara	%	100	100%	100%
IKSP-4	Persentase rehabilitasi jalan	%	100	83,97%	83,97%
IKSP-5	Persentase Jembatan yang dibangun	%	100	100%	100%
IKSP-6	Persentase pemeliharaan Jembatan yang dibangun	%	100	100%	100%

Sumber : Bidang Bina Marga

Berdasarkan dokumen RENSTRA Tahun 2021-2026, target indikator kinerja “Persentase panjang jalan dalam kondisi baik” pada tahun 2023 adalah 20%. Pada tahun 2023 persentase jalan dalam kondisi baik yang dicapai oleh DPU-PR.PERKIM senilai 22,83% dengan capaian kinerja sebesar 114,15%, dimana mencapai angka sebesar 20% dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja untuk Sasaran Strategis 1 dapat diukur berdasarkan tabel 3.7 berikut:

Tabel. 3.7
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN
1.	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun di perdesaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Jalan}} \times 100$ $= \frac{238,44 \text{ Km}}{1043,20 \text{ Km}} \times 100$ $= 22,83\%$

Sumber : Bidang Bina Marga

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dapat tercapai melalui pencapaian program dan didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023 capaian dari output kegiatan tersebut. Sasaran Strategis “Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun di perdesaan” didukung oleh s asaran Program “a. Persentase panjang jalan yang terbangun tahun n,b. Persentase panjang jalan yang ditingkatkan tahun n, c. Persentase panjang jalan yang terpelihara tahun n ” yang diukur dengan menggunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program, yaitu:

1. IKSP-1: Persentase jalan yang dibangun

Target IKSP ini pada tahun 2023 adalah 20%. Bidang Bina Marga pada akhir tahun 2023 mencapai persentase jalan yang dibangun sebesar 22,83% dengan capaian kinerja sebesar 114,15% dari target, dimana tidak terdapat gap dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut merupakan hasil realisasi terhadap target pada tahun berjalan yakni tahun 2023. Berdasarkan data kasi Pembangunan Jalan, kegiatan yang terlaksana terkait dukungan kondisi jalan hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel. 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Program 1

Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Kegiatan Pembangunan Jalan Tahun 2023	Ket.
Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Menuju Pasar Malinau Seberang	Malinau Utara	Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis AUS (AC-WC) 0,5 Km	Tercapai
Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Simpang Swadaya RT 13 menuju Jalan Raja Alam (SMP 1 Malinau Kota)	Malinau Kota	Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis AUS (AC-WC) 0,1 Km	Tercapai
Pembangunan Jalan	Pembangunan Plat Duiker Jalan Belakang Kantor Polres Malinau	Malinau Kota	Pembangunan Plat Duiker	Tercapai

2. IKSP-2: Persentase jalan yang ditingkatkan

Tabel. 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Program 1

Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Kegiatan Peningkatan Jalan Tahun 2023	Ket.
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Jembatan Singai Terang Menuju Desa Mentarang Baru (Dak Penugasan Tematik 1)	Mentarang	Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Laston Lapis AUS (AC-WC) 3,85 Km	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Eks Inhutani II Logpon Sita Tg. Lapang (Dak Penugasan Tematik 1)	Malinau Barat	Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC – BC) 7,57 Km	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Dalam Desa Long Nawang (DAK Penugasan Tematik 3)	Kayan Hulu	2,54 Km Peningkatan Lapis Penetrasi Macadam	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Dalam Desa Long Ampung (DAK Penugasan Tematik 3)	Kayan Selatan	1,05 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Lapis Penetrasi Macadam	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Menuju Nawang Baru - Desa Long Temuyat No.277(DAK Penugasan Tematik 3)	Kayan Hulu	1,61 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Lapis Penetrasi Macadam	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Kalamok BBI Tahap 1	Malinau Utara	2,5 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan RT.13 Malinau Kota Tahap III	Malinau Kota	1 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Menuju Kuburan Kristen Malinau Barat	Malinau Barat	1 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Simpang Seluwing (Tower) Tahap II	Malinau Kota	0,5 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Desa Semenggaris Tahap II	Malinau Utara	0,73 km Peningkatan Struktur Perkerasan Jalan Beton fc’15, Aramco, Pasang batu	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Dalam Desa Tanjung Keranjang Tahap II	Malinau Kota	1,38 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Desa Sentaban Tahap II	Malinau Barat	1,49 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai

Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Desa Long Kemuat (DAK TRANDES)	Bahau Hulu	4,4 Km Agregat Sirtu	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Mantri Anom Malinau Utara TAHAP II	Malinau Utara	0,47 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan dalam Desa Long Uro Menuju Lidung Payau	Kayan Selatan	22 Km Agregat Sirtu	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Menuju Puskesmas Sungai Boh	Sungai Boh	1 Km Rigid Pavement / Semenisasi	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan menuju Vihara Bodhi Sasana	Malinau Kota	0,3Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Daeng Baka RT.18 Malinau Kota	Kecamatan Malinau Kota	0,3 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Desa Kelapis	Kecamatan Malinau Utara	0,6 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Desa Pelita	Kecamatan Malinau Kota	3 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Lingkungan 2 RT 18 (Jl. H.Kadir)	Kecamatan Malinau Kota	0,42 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Kabiran menuju Gereja POS PU GKII Kabiran	Kecamatan Malinau Utara	3 Km Agregat Sirtu	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Desa Respen	Kecamatan Malinau Utara	0,6 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Menuju Pemakaman Tionghoa	Malinau Utara	1 Km Agregat Sirtu	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Desa Pulau Sapi (Simpang GKII-Simpang Kantor Camat)	Mentarang	0,5 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Pembangunan I	Malinau Kota	0,42 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Preservasi Jalan Simpang Colombus Malinau Kota	Malinau Kota	0,6 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Relokasi Gg. Doremi	Malinau Kota	0,34 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai

Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Desa Setarap - Kantor Camat Masehi	Malinau Selatan Hilir	1,9 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan RT.1 Menuju RT.17 Malinau Kota	Malinau Kota	0,15 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai
Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Samping SMA 1 Malinau - Jl Imanuel	Malinau Kota	0,59 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai

3. IKSP-3: Persentase jalan yang dipelihara

Tabel. 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Program 1

Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2023	Ket.
Pemeliharaan Berkala Jalan	Jalan Kabupaten Malinau	Malinau Kota	1 Km Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC)	Tercapai

4. IKSP-3: Persentase jalan yang direhabilitasi

Tabel. 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Program 1

Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2023	Ket.
Rehabilitasi Jalan	Penimbunan/Pemeliharaan Jalan Tani Semeladung Indah (Samping BBI Kaliyamok)	Malinau Utara	Rehabilitasi Jalan (Penimbunan/Pemeliharaan) Jalan Tani Semeladung Indah (Samping BBI Kaliyamok) di Desa Kaliyamok RT 4 Kec. Malinau Utara	Tercapai
	Penimbunan dan Grading Jalan Tani Menuju Jl. Poros Propinsi (15 Titik) di Desa Mentarang Baru	Mentarang	Rehabilitasi Jalan (Penimbunan dan Grading Jalan Tani) Menuju Jl. Poros Propinsi (15 Titik) di Desa Mentarang Baru Kec. Mentarang	Tercapai
	Penimbunan Jalan 1000 m ³ pada fasilitas umum Desa Tg. Keranjang	Malinau Kota	Penimbunan Jalan 1000 m ³ pada fasilitas umum Desa Tg. Keranjang Kec. Malinau Kota	Tercapai
	Penimbunan Jalan GG. Sopoyono RT. 20 Depan Pasar Induk	Malinau Kota	Rehabilitasi Jalan (Penimbunan) Jalan GG. Sopoyono RT. 20 Depan Pasar Induk Kec. Malinau Kota	Tercapai
	Penimbunan) Jalan TR 13 Malinau Kota (Ujung Jalan Samping Rumah Bpk. Topan Amrulah	Malinau Kota	Rehabilitasi Jalan (Penimbunan) Jalan TR 13 Malinau Kota (Ujung Jalan Samping Rumah Bpk. Topan Amrulah) Kec. Malinau Kota	Tidak Tercapai

5. IKSP-4: Persentase Jembatan yang dibangun

Tabel. 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Program 1

Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Kegiatan Pembangunan Jembatan	Ket.
Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Setarap-Desa Punan Setarap	Malinau Selatan Hilir	120 M Jembatan Gantung	Tercapai

6. IKSP-5: Persentase pemeliharaan Jembatan yang dipelihara

Tabel. 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Program 1

Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Kegiatan Pemeliharaan Jembatan	Ket.
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Jembatan Malinau	Malinau Selatan Hilir	Perkuatan Oprit Jembatan	Tercapai
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rehabilitasi Jembatan Gantung Pulau Sapi	Mentarang	Rehabilitasi Jembatan	Tercapai

Dalam rangka mendukung sasaran strategis 1 "Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan", melalui "Program Penyelenggaraan Jalan", Kegiatan terdiri atas pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan preventif jalan, pemeliharaan rehabilitasi jalan, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jembatan dan pembangunan jembatan dapat terlaksana pada Tahun 2023 diantaranya beberapa output berikut:

1. IKSP-1: Persentase jalan yang dibangun



Gambar 3.1 Pembangunan Jalan Pasar Malinau Seberang

Pembangunan Jalan Menuju Pasar Malinau Seberang termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/22.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 07 Mei 2024 dengan masa pekerjaan selama 150 hari dan rencana FHO pada 05 November 2023. Total anggaran pembangunan Jalan Desa Taras sebesar Rp 1.500.000.000-. yang dibiayai oleh APBD. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC – BC) dengan panjang 0,5 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 93,24% atau senilai Rp 1.398.644.326,-.

2. IKSP-1: Peresentase Jalan yang dibangun



Gambar 3.2 Pembangunan Jalan Simpang Swadaya RT 13 Menuju Jalan Raja (SMP 1 Malinau Kota

Pembangunan Jalan Simpang Swadaya RT 13 Menuju Jalan Raja Alam (SMP 1 Malinau Kota) termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/26.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 14 Juni 2024 dengan masa pekerjaan selama 150 hari dan rencana FHO pada 01 November 2023. Total anggaran pembangunan Jalan Desa Taras sebesar Rp 475.000.000.- yang dibiayai oleh APBD. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC – WC) dengan panjang 0,1 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 92,04% atau senilai Rp 437.171250,-

3. IKSP-2: Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.3 Peningkatan Jalan Jembatan Singai Terang

Peningkatan Jalan Jembatan Singai Terang Menuju desa Mentarang Baru (DAK PENUGASAN TEMATIK I) termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/01.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 03 April 2023 dengan masa pekerjaan selama 180 hari dan rencana FHO pada 01 Oktober 2023. Total anggaran Peningkatan Jalan Jembatan Singai Terang Menuju desa Mentarang Baru sebesar Rp 8.636.621.237.-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC) dengan panjang 3,85 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 98,12% atau senilai Rp 8,779,661,000.00 -.

4. IKSP-2: Persentase jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.4 Peningkatan Jalan Eks Inhutani II Logpon Sita

Peningkatan Jalan Eks Inhutani II Logpon Sita Tg. Lapang (DAK PENUGASAN TEMATIK 1) termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/02.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 06 April 2023 dengan masa pekerjaan selama 240 hari dan rencana FHO pada 3 Desember 2024. Total anggaran Pemeliharaan Jalan menuju Pelabuhan Kelapis No. 168 sebesar Rp 13.843.429.763-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Peningkatan Struktur Laston Lapis Aus (AC – WC), Bahu Jalan Beton, Drainase Pasangan Batu Mortar. dengan panjang 7,57 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,46% atau senilai Rp 13,768,864,000.00 -.

5. IKSP-2: Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.5 Peningkatan Jalan Dalam Desa Long Nawang

Peningkatan Jalan Dalam Desa Long Nawang (DAK Penugasan Tematik 3) termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/03.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 10 April 2023, dengan masa pekerjaan selama 240 hari dan rencana FHO pada 06 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 5.783.190.061-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Peningkatan Struktur Laston Lapis Aus (AC – WC). dengan panjang 2,54 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,56% atau senilai Rp 5,759,740,000.00 –

6. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.6 Peningkatan Dalam Desa Long Ampung

Peningkatan Jalan Dalam Desa Long Ampung (DAK Penugasan Tematik 3) termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/04.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 05 April 2023 dengan masa pekerjaan selama 240 Hari dan rencana FHO pada 05 Desember. Total anggaran pembangunan Jalan Desa Taras sebesar Rp 6.377.923.120-.. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Peningkatan Struktur Perkerasan Lapis Penetrasi Macadam dengan panjang 1,05 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,68% atau senilai Rp 6,357,299,000.00 -

7. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.7 Peningkatan Jalan Kalamok BBI

Peningkatan Jalan Kalamok BBI Tahap 1 termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/06.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 10 April 2023 dengan masa pekerjaan selama 180 hari dan rencana FHO pada 07 Oktober 2023. Total anggaran Peningkatan Jalan dalam Desa Tanjung Keranjang sebesar Rp 2.772.580.000-.. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC) dengan panjang 2,55 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 94,94% atau senilai Rp 2,632,219,150.00-..

8. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.8 Peningkatan Jalan RT.13 Malinau Kota

Peningkatan Jalan RT.13 Malinau Kota Tahap III termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/07.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 10 April 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 hari dan rencana FHO pada 07 September 2023. Total anggaran sebesar Rp 1.741.790.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC). dengan panjang 1 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,90% atau senilai Rp 1,740,124,000.00-.

9. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.9 Peningkatan Jalan Menuju Kuburan Kristen Malinau Barat

Peningkatan Jalan Menuju Kuburan Kristen Malinau Barat termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/08.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 18 April 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 hari dan rencana FHO pada 15 September 2023. Total anggaran sebesar Rp 3.669.580.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC). dengan panjang 1 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,85% atau senilai Rp 3,664,220,000.00 -.

10. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.10 Peningkatan Jalan Simpang Seluwing (Tower)

Peningkatan Jalan Simpang Seluwing (Tower) Tahap II termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/09.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 18 April 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 hari dan rencana FHO pada 15 September 2023. Total anggaran sebesar Rp 1.891.780.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC). dengan panjang 0,5 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,21% atau senilai Rp 1,876,864,000.00 -.

11. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.11 Peningkatan Jalan Desa Semenggaris

Peningkatan Jalan Desa Semenggaris Tahap II termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/10.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 27 April 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 hari dan rencana FHO pada 24 September 2023. Total anggaran sebesar Rp 1.449.570.000,-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC). dengan panjang 0,73 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 94.73% atau senilai Rp 1,373,112,900.00 -.

12. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.12 Peningkatan Jalan Dalam Desa Tanjung Kranjang

Peningkatan Jalan Dalam Desa Tanjung Keranjang Tahap II termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/11.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 27 April 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 hari dan rencana FHO pada 24 September 2023. Total anggaran sebesar Rp 1.449.570.000,00,- Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC). dengan panjang 1,38 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,84% atau senilai Rp 1,447,268,000.00 -.

13. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.13 Peningkatan Jalan Dalam Desa Sentaban

Peningkatan Jalan Desa Sentaban Tahap II termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/12.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 27 April 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 hari dan rencana FHO pada 24 September 2023. Total anggaran sebesar Rp 1.324.862.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Peningkatan Struktur Perkerasan Laston Lapis Aus (AC-WC). dengan panjang 1,49 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,21% atau senilai Rp 1,286,513,809.00 -.

14. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.14 Peningkatan Jalan Dalam Desa Long Kemuat

Peningkatan Jalan Desa Long Kemuat (DAK TRANDES) termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/13.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 18 April 2023 dengan masa pekerjaan selama 250 hari dan rencana FHO pada 27 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 7.908.073.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Peningkatan Agregat Sirtu dengan panjang 4,4 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 48% atau senilai Rp 3,821,372,118.00 -.

15. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.15 Peningkatan Jalan Mantri Anom Malinau Utara Tahap II

Peningkatan Jalan Mantri Anom Malinau Utara TAHAP II termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/14.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 28 April 2023 dengan masa pekerjaan selama 180 hari dan rencana FHO pada 25 Oktober 2023. Total anggaran sebesar Rp 2.186.680.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Peningkatan Agregat Sirtu dengan panjang 4,4 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,50% atau senilai Rp 2,175,796,000.00 -.

16. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.16 Peningkatan Jalan dalam Desa Long Uro Menuju Lidung Payau

Peningkatan Jalan dalam Desa Long Uro Menuju Lidung Payau termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/14.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 30 Mei 2023 dengan masa pekerjaan selama 180 hari dan rencana FHO pada 27 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 2.937.142.000-.. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Peningkatan Agregat Sirtu dengan panjang 2,2 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 97.71% atau senilai Rp 1,836,567,000.00 -.

17. IKSP-2: Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.17 Peningkatan Jalan Menuju Puskesmas Sungai Boh

Peningkatan Jalan Menuju Puskesmas Sungai Boh termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/16.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 18 April 2023 dengan masa pekerjaan selama 250 hari dan rencana FHO pada 27 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 1.924.482.000-.. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Rigid Pavement / Semenisasi dengan panjang 1 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 97.71% atau senilai Rp 1,904,287,450.00 -.

18. IKSP-2 : Persentase Jalan yang di tingkatkan



Gambar 3.18 Peningkatan Jalan menuju Vihara Bodhi Sasana

Peningkatan Jalan menuju Vihara Bodhi Sasana termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/17.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 31 Mei 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 hari dan rencana FHO pada 10 November 2023. Totagaran sebesar Rp 1.152.570.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Laston Lapis AUS (AC-WC) dengan panjang 0,3 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 97.71% atau senilai Rp 1,120,761,100.00 -.

19. **IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan**



Gambar 3.19 Peningkatan Jalan Daeng Baka RT.18 Malinau Kota

Peningkatan Jalan Daeng Baka RT.18 Malinau Kota termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/18.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 31 Mei 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 hari dan rencana FHO pada 10 November 2023. Total anggaran sebesar Rp 942.790.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Laston Lapis AUS (AC-WC) dengan panjang 0,3 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 94,82% atau senilai Rp 893,960,450.00-.

20. **IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan**



Gambar 3.20 Peningkatan Jalan Desa Kelapis

Peningkatan Jalan Desa Kelapis termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/19.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 06 Juni 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 hari dan rencana FHO pada 03 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 1.396.790.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Laston Lapis AUS (AC-WC) dengan panjang 0,6 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 97.71% atau senilai Rp 1.393.406.000,00-.

21. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.21 Peningkatan Jalan Desa Pelita Kanaan

Peningkatan Jalan Desa Pelita Kanaan termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/20.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 06 Juni 2023 dengan masa pekerjaan selama 180 Hari dan rencana FHO pada 03 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 1.951.790.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Laston Lapis AUS (AC-WC) dengan panjang 3 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,68% atau senilai Rp 1.945.617.000-.

22. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.22 Peningkatan Jalan Lingkungan II RT 18 (Jl. H.KADIR)

Peningkatan Jalan Lingkungan II RT 18 (Jl. H.KADIR) termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/21.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 06 Juni 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 Hari dan rencana FHO pada 03 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 1.242.790.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Laston Lapis AUS (AC-WC) dengan panjang 0,42 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,71% atau senilai Rp 1,239,132,000.00-.

23. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.23 Peningkatan Jalan Kabiran menuju Gereja POS PU GKII Kabiran

Peningkatan Jalan Kabiran menuju Gereja POS PU GKII Kabiran termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/23.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 07 Mei 2023 dengan masa pekerjaan selama 200 Hari dan rencana FHO pada 30 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 2.722.470.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Agregat Sirtu dengan panjang 3 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 80,21% atau senilai Rp 2.183.574.500-.

24. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.24 Peningkatan Jalan Desa Respen

Peningkatan Jalan Desa Respen termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/24.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 14 Juni 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 Hari dan rencana FHO pada 11 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 1.221.790.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Laston Lapis AUS (AC-WC) dengan panjang 0,6 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,91% atau senilai Rp 1.132.000.000-.

25. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.25 Peningkatan Jalan Pemakaman Tionghoa

Peningkatan Jalan Pemakaman Tionghoa termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/24.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 14 Juni 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 Hari dan rencana FHO pada 11 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 1.891.790.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Laston Lapis AUS (AC-WC) dengan panjang 0,6 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,30% atau senilai Rp 1.874.492.000-.

26. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.26 Peningkatan Jalan Desa Pulau Sapi (Simpang GKII-Simpang Kantor Camat)

Peningkatan Jalan Desa Pulau Sapi (Simpang GKII-Simpang Kantor Camat) termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/27.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 03 Juni 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 Hari dan rencana FHO pada 11 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 788.000.000,-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Laston Lapis AUS (AC-WC) dengan panjang 0,5 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,90% atau senilai Rp 764.000,00,-.

27. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.27 Peningkatan Jalan Pembangunan I

Peningkatan Jalan Pembangunan I termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/28.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 12 Juli 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 Hari dan rencana FHO pada 11 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 942.790.000,00,-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Laston Lapis AUS (AC-WC) dengan panjang 1 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,84% atau senilai Rp 941.325.000,-.

28. IKSP-13 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.28 Peningkatan Jalan Simpang Columbus

Peningkatan Jalan simpang Colombus Malinau Kota termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/31.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 04 Agustus 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 Hari dan rencana FHO pada 31 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 1.375.790.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Laston Lapis AUS (AC-WC) dengan panjang 0,6 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 97.71% atau senilai Rp 1,361,708,325.00 -.

29. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.29 Peningkatan Jalan Gg. Doremi

Peningkatan Jalan Gg. Doremi termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/32.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 04 Agustus 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 Hari dan rencana FHO pada 31 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 1.139.790.000,-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Laston Lapis AUS (AC-WC) dengan panjang 0,34 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,90% atau senilai Rp 1.062.874.111-.

30. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkan



Gambar 3.30 Peningkatan Jalan Desa Setarap - Kantor Camat Masehi

Peningkatan Jalan Desa Setarap - Kantor Camat Masehi termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/33.6/SPPBJ/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 04 Agustus 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 Hari dan rencana FHO pada 31 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 3.847.560.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Laston Lapis AUS (AC-WC) dengan panjang 1,9 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 97.71% atau senilai Rp 2,305,241,953.00 -.

31. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.31 Peningkatan Jalan RT.1 Menuju RT.17 Malinau Kota

Peningkatan Jalan RT.1 Menuju RT.17 Malinau Kota termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/34.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 04 Agustus 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 Hari dan rencana FHO pada 31 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 1.891.790.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Laston Lapis AUS (AC-WC) dengan panjang 0,15 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,21% atau senilai Rp 514,125,400.00 -.

32. IKSP-2 : Persentase Jalan yang ditingkatkan



Gambar 3.32 Peningkatan Jalan Samping SMA 1 Malinau - Jl Imanuel

Peningkatan Jalan Samping SMA 1 Malinau - Jl Imanuel termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/36.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 29 Agustus 2023 dengan masa pekerjaan selama 120 Hari dan rencana FHO pada 28 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 546.000.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Laston Lapis AUS (AC-WC) dengan panjang 99,36 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 97.71% atau senilai Rp 542,492,793.00

33. IKSP-3 : Persentase Jalan yang di Pelihara



Gambar 3.33 Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Malinau

Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Malinau termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/29.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 14 Juli 2023 dengan masa pekerjaan selama 150 Hari dan rencana FHO pada 09 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 714.940.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Laston Lapis AUS (AC-WC) dengan panjang 1 Km. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 14,20% atau senilai Rp 283,707,650.00 -.

34. IKSP-4 : Rehabilitasi Jalan



Gambar 3.34 Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Malinau

Rehabilitasi Jalan (Penimbunan/Pemeliharaan) Jalan Tani Semeladung Indah (Samping BBI Kaliamok) di Desa Kaliamok RT 4 Kec. Malinau Utara termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/57.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 25 Desember 2023 dengan masa pekerjaan selama 7 Hari dan rencana FHO pada 31 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 44.444.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Timbunan dengan Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99.91% atau senilai Rp 44.000.00-.

35. IKSP-4 : Rehabilitasi Jalan



Gambar 3.35 Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Malinau

Rehabilitasi Jalan (Penimbunan dan Grading Jalan Tani) Menuju Jl. Poros Propinsi (15 Titik) di Desa Mentarang Baru Kec. Mentarang termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/56.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 25 Desember 2023 dengan masa pekerjaan selama 7 Hari dan rencana FHO pada 31 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 47.444.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Timbunan dengan Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 95.52% atau senilai Rp 45,318,000.-.

36. IKSP-4 : Rehabilitasi Jalan



Gambar 3.36 Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Malinau

Penimbunan Jalan 1000 m³ pada fasilitas umum Desa Tg. Keranjang Kec. Malinau Kota termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/53.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 25 Desember 2023 dengan masa pekerjaan selama 25 Hari dan rencana FHO pada 31 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 146.722.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Timbunan dengan Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,89% atau senilai Rp 159.465,00-.

37. IKSP-4 : Rehabilitasi Jalan



Gambar 3.37 Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Malinau

Rehabilitasi Jalan (Penimbunan) Jalan GG. Sopoyono RT. 20 Depan Pasar Induk Kec. Malinau Kota termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/52.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 08 Desember 2023 dengan masa pekerjaan selama 25 Hari dan rencana FHO pada 31 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 48.542.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Timbunan dengan Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,90% atau senilai Rp 48,492,455.00 -.

38. IKSP-5 : Pembangunan Jembatan



Gambar 3.38 Pembangunan Jembatan Gantung Desa Setarap-Desa Punan Setarap

Pembangunan Jembatan Gantung Desa Setarap-Desa Punan Setarap termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/30.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 07 Juli 2023 dengan masa pekerjaan selama 176 Hari dan rencana FHO pada 31 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 14.679.840.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Pembangunan Jembatan Gantung dengan Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 97.98% atau senilai Rp 14,383,208,000.00 -.

39. IKSP-6 : Pemeliharaan Rutin Jembatan



Gambar 3.39 Pemeliharaan Jembatan Malinau

Pemeliharaan Jembatan Malinau termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/35.6/SPPBJ/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 29 Agustus 2023 dengan masa pekerjaan selama 120 Hari dan rencana FHO pada 29 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 628.860.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Perkuatan Oprit Jembatan dengan Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 98,88% atau senilai Rp 621,790,263.00

40. IKSP-6 : Pemeliharaan Rutin Jembatan



Gambar 3.40 Rehabilitasi Jembatan Gantung Pulau Sapi

Rehabilitasi Jembatan Gantung Pulau Sapi termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak 600/37.6/KONTRAK/PPK/BM/2023, tertanggal kontrak 05 Oktober 2023 dengan masa pekerjaan selama 87 Hari dan rencana FHO pada 31 Desember 2023. Total anggaran sebesar Rp 2.053.870.000-. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah Rehabilitasi Jembatan dengan Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,37% atau senilai Rp 2,040,909,052.00 -.

Pelaksanaan 40 kegiatan Bidang Bina Marga dengan Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan di tahun 2023 tersebut telah meningkatkan kondisi jalan mantap. Untuk perhitungan kondisi kemantapan jalan ini dilakukan secara kumulatif dari kondisi jalan pada tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian setelah dilakukan penyelarasan dengan *outcome* pada Tahun 2023 maka rincian kondisi jalan Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 3.14
Kondisi Jalan Kabupaten Malinau Tahun 2023

No.	URAIAN	KONDISI JALAN 2023	
		Km	%
I	Mantap		45
	a. Baik	206,03	19,750
	b. Sedang	44,63	4,278
II	Tidak Mantap		55
	a. Rusak Ringan	31,30	3,001
	b. Rusak Berat	761,24	72,972

Sumber : Bidang Bina Marga

Capaian ini menunjukkan hasil kerja keras seluruh personil Dinas PUPR-PERKIM dalam rangka mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan sesuai dengan Misi Kepala Daerah Kabupaten Malinau, dan hal ini terjadi karena dilakukan beberapa upaya percepatan mulai dari pemrograman hingga pelaksanaan, meliputi :

1. Dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat yakni APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik reguler maupun penugasan
2. Penyiapan dokumen *readiness criteria* (dokumen perencanaan teknis, DED, RAB yang dilakukan pada tahun sebelumnya
3. Komitmen dan penekanan pimpinan DPU-PR.PERKIM untuk melakukan strategi percepatan pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing PPK/PPTK
4. Dukungan penggunaan Sistem SPSE (sistem pengadaan secara elektronik) yang dapat membantu POKJA dalam pelaksanaan proses pelelangan
5. Dukungan sistem *eMonitoring Online* yang sangat membantu dan mendukung pemantauan progres pelaksanaan kegiatan di lapangan.
6. Kerjasama & koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders.

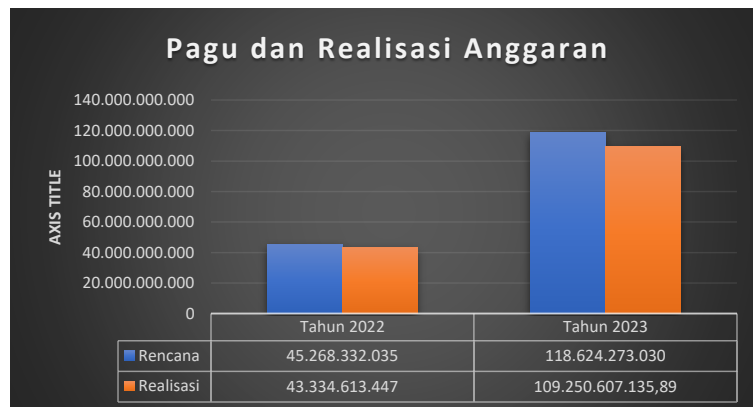
b. Analisis Atas Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Bidang Bina Marga

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.



Berdasarkan diagram di atas, tampak bahwa rencana pagu anggaran pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan rencana pagu anggaran Tahun 2023. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan APBD Kabupaten Malinau untuk Dinas PUPR-PERKIM bidang bina marga sehingga terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 73.355.940.995,00 yakni dari pagu tahun 2022 Rp 45.268.332.035,00-. menjadi Rp 118.624.273,030,00 atau sekitar 87,01% ditahun 2023. Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran kisaran 14,51% dengan sisa sebesar Rp 12.239.665.894,11-.

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Efisiensi SDM khususnya SDM Bidang Bina Marga, UPTD dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S3 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja I

Penyelenggaraan Jalan pada tahun 2023, dari penanganan kegiatan pembangunan jalan capaian indikator kinerja pertama yaitu Kabupaten Malinau dalam mencapai jalan dalam kondisi baik sebesar 22.83%. Untuk jalan kabupaten pada akhir 2023 mengalami peningkatan, dari target 20% meningkat yang disebabkan perubahan laju penurunan kondisi jalan yang diimbangi dengan upaya peningkatan jalan dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. Hal ini secara prinsip diupayakan penyelesaiannya dengan perhatian terus menerus dan berkesinambungan terhadap sarana pendukung serta kebijakan

penganggaran APBD yang lebih proporsional dan pemanfaatan dana pusat. Adapun faktor mendukung keberhasilan, hambatan dan tidak lanjut sebagai berikut:

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Ketersediaan barang-barang pabrikan yang sesuai spesifikasi teknis
2. Perencanaan tepat guna tepat sasaran sehingga pengerjaan selesai tepat waktu
3. Pemilihan penyedia jasa yang tepat
4. Tersedianya SDM yang kompeten.
5. Tersedianya anggaran dari Pemerintah Daerah melalui APBD Murni
6. Komitmen dan penekanan pimpinan DPU-PR.PERKIM untuk melakukan strategi percepatan pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing PPK/PPTK.
7. Kerjasama & koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders.

Hambatan :

1. Kondisi dilapangan yang seringkali mengalami perubahan dengan adanya permintaan dari warga dan kondisi arus lalu lintas di jalan yang semakin padat

Tindak Lanjut :

1. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.

CAPAIAN KINERJA II
Meningkatnya akses terhadap permukiman yang layak

Tabel. 3.15
Pencapaian Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase rumah tangga bersanitasi layak %	Persentase	40%	81,41%	203,52%

Sumber: Bidang Cipta Karya

Dari Tabel diatas dapat dilihat hasil Meningkatnya infrastruktur sumber air minum layak tahun 2023 bahwa Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Cipta Karya memperoleh capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tahun 2023 adalah sebesar 203,52%. Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahunan 2023 dengan tahun 2022, 2021, dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel. 2.16
Perbandingan Antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun.....		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase	81,41%	-	-	81,16	-	-	105,41

Sumber: Bidang Cipta Karya

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya adalah perbandingan realisasi Persentase rumah tangga bersanitasi layak tahun 2023 sebesar 81,41% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 81,16% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 0,99% terhadap capaian tahun 2023. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel. 3.16
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase	81,16%	81,97 %	0,99%

Sumber: Bidang Cipta Karya

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan nilai evaluasi tahun 2023 sebesar 81,16% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 81,97% Maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian nilai evaluasi sebesar 0,99% Terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

1. Dibandingkan dengan Standar Nasional

Dibandingkan dengan target nasional yang terdapat dalam Permen Pekerjaan Umum No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Bidang Pekerjaan Umum Jenis pelayanan dasar SPM bidang Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang meliputi Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Target capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2023 pada jenis pelayanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dalam indikator program yaitu Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dengan standar pusat tercapai 100% dari target daerah dan di tahun 2023 telah tercapai 81,16% dari target 40%.

Table. 3.17
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS-3 Meningkatnya infrastruktur akses sanitasi layak				
IKSS	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	40%	81,41%	203,52%
SP Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem pengolahan air limbah				
IKSP	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan dari SPALD S pada tahun n	100%	33,3%	33,3%

Sumber : Bidang Cipta Karya

Berdasarkan dokumen RENSTRA Tahun 2021-2026, target indikator kinerja “Proporsi Rumah dengan Sanitasi Layak” pada tahun 2023 adalah 40%. Pada tahun 2023 Persentase KK yang mendapat pelayanan dari SPALD S pada tahun n yang dicapai oleh DPU-PR.PERKIM senilai 81,41% dengan capaian kinerja sebesar 203,52%, dimana mampu mencapai target sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Data tersebut disajikan berdasarkan hasil pengumpulan data dari pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan dan sifatnya bukan kumulatif terhadap tahun-tahun sebelumnya sehingga

menghasilkan data yang hanya berdasarkan tahun anggaran berjalan tersebut yakni tahun 2023. Capaian kinerja untuk Sasaran Strategis 3 dapat diukur berdasarkan tabel 2.5 berikut:

Tabel 3.18
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN
1.	Meningkatnya infrastruktur akses sanitasi layak	Proporsi Rumah dengan Sanitasi Layak	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD X100% Jumlah rumah di Kabupaten A 16.247 = X100 19.956 = 81,41%

Sumber : Bidang Cipta Karya

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dapat tercapai melalui pencapaian program dan didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023 capaian dari output kegiatan tersebut. Sasaran Strategis “Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem pengolahan air limbah ” didukung oleh s asaran Program “Persentase KK yang mendapat pelayanan dari SPALD S pada tahun n ” yang diukur dengan menggunakan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program, yaitu:

IKSP: Persentase KK yang mendapat pelayanan dari SPALD S pada tahun n

Target IKSP ini pada tahun 2023 adalah 40%. Bidang Cipta Karya pada akhir tahun 2023 mencapai Persentase KK yang mendapat pelayanan dari SPALD S pada tahun n sebesar 81,41% dengan capaian kinerja sebesar 203,52% dari target, dimana tidak terdapat gap dari target yang ditetapkan. capaian tersebut merupakan hasil realisasi terhadap target pada tahun berjalan yakni tahun 2023. Berdasarkan data penyelenggaraan SPALD S, kegiatan yang terlaksana terkait dukungan akses masyarakat terhadap sanitasi hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.19

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal	Ket.
Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal Kec. Malinau Barat	Malinau Barat	pekerjaan Perpipaan pekerjaan Grease Trap pekerjaan Bak Kontrol pekerjaan Drainase	Tercapai
	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal Kec. Malinau Kota	Malinau Kota	pekerjaan Perpipaan pekerjaan Grease Trap pekerjaan Bak Kontrol pekerjaan Drainase pekerjaan Normalisasi Saluran Perbaikan Gorong-gorong	Tercapai
	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal Kec. Sungai boh	Sungai Boh	Pekerjaan sanitasi	Tidak Tercapai
	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal Kec. Kayan selatan	Kayan Selatan	Pekerjaan sanitasi	Tidak Tercapai

Pelaksanaan dari kegiatan pembangunan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal tersebut telah meningkatkan jumlah pelayanan sanitasi sebanyak 50 rumah tangga. Berikut tabel pelayanan sanitasi melalui kegiatan SPALD.

Tabel 3.20 Pelayanan Masyarakat Terhadap Akses Sanitasi Layak

No	Output	Panjang Pipa (Meter)	Sambungan Rumah*	Jiwa Terlayani**	Proyeksi Penduduk (2020)***	
1.	Pekerjaan Pengadaan Pipa	240	90	450	81.243	
2.	kerjaan Bak Kontrol 25 Unit		90	450		
3.	kerjaan Grease Trap 40 Unit		90	880		
4.	Pekerjaan Septic Tank		18			

Keterangan :

- *1 SR = 1 KK
- **Asumsi 1 KK = 5 Jiwa
- ***Data Proyeksi Penduduk, sumber data DUKCAPIL

Berdasarkan hasil tabel di atas tampak bahwa Bidang Cipta Karya mampu melaksanakan sasaran strategis tersebut dengan baik sesuai target yang telah ditentukan.

Capaian ini menunjukkan hasil kerja keras seluruh personil Dinas PUPR-PERKIM dalam rangka mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan sesuai dengan Misi Kepala Daerah Kabupaten Malinau, dan hal ini terjadi karena dilakukan beberapa upaya percepatan mulai dari pemrograman hingga pelaksanaan, meliputi :

- ❖ Dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat yakni APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik reguler maupun penugasan
- ❖ Penyiapan dokumen *readiness criteria* (dokumen perencanaan teknis, DED, RAB yang dilakukan pada tahun sebelumnya
- ❖ Komitmen dan penekanan pimpinan DPU-PR.PERKIM untuk melakukan strategi percepatan pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing PPK/PPTK
- ❖ Dukungan penggunaan Sistem SPSE (sistem pengadaan secara elektronik) yang dapat membantu POKJA dalam pelaksanaan proses pelelangan
- ❖ Dukungan sistem *eMonitoring Online* yang sangat membantu dan mendukung pemantauan progres pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- ❖ Kerjasama & koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders

Berikut dokumentasi dari beberapa output Sasaran Program “Meningkatnya infrastruktur akses sanitasi layak”:

1. IKSP-1: Pembangunan Jaringan SPALD



Gambar 3.41 Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal Kec. Malinau

Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal Kec. Malinau Kota termasuk ke dalam Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jaringan tahun 2022, Tertanggal 16 November 2023 dengan Nomor SPK: 575/PPK/SPK-KONST.PSPALKMALKOT/CK masa pekerjaan selama 40 hari. Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal Kec. Malinau Kota sebesar Rp 200.000.000- Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 87,96% atau senilai Rp 156,280,000.00 -.

2. IKSP-1 : Pembangunan Jaringan SPALD



Gambar 3.42 Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal Kec. Malinau Barat

Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal Kec. Malinau Barat termasuk ke dalam Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jaringan tahun 2023,

Tertanggal 16 November 2023 dengan Nomor SPK: 572/PPK/SPK-KONST.PSPALKMALBAR/CK masa pekerjaan selama 40 hari. Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal Kec. Malinau Barat sebesar Rp 200.000.000- Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 78,14% atau senilai Rp 175,913,000.00 -.

3. Analisis Atas Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Bidang Cipta Karya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

- 1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
- 2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

Efisiensi SDM khususnya SDM Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S2 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Analisis atas efektivitas dan efisiensi penguanaan sumber daya Anggaran



Berdasarkan diagram di atas, tampak bahwa rencana pagu anggaran pada Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan rencana pagu anggaran Tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian anggaran Dinas PUPR-PERKIM bidang cipta karya sehingga terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 3.201.583.600atau sekitar 2,70%. Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efesiensi anggaran kisaran 42,39% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.083.996.656.

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Efisiensi SDM khususnya SDM Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S2 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 2

Akses Sanitasi Layak untuk capaian indikator keempat yaitu persentase rumah tangga bersanitasi layak yaitu sebesar 77 persen dari target RPJMD dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami peningkatan dengan realisasi 81,16 persen. Adapun faktor mendukung keberhasilan, hambatan dan tidak lanjut pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi selesai tepat waktu.
2. Pemilihan penyedia jasa konsultasi dan konstruksi yang tepat karena mengikuti metode pemilihan yang dianjurkan oleh Unit Layanan Pengadaan atau LPSE.
3. Dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga mampu merekam kejadian/permasalahan yang dihadapi serta penanganannya.

Hambatan :

1. Kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada pekerjaan fisik di lapangan
2. Kondisi di lapangan kadang dapat mengalami perubahan rencana

Tindak Lanjut :

1. Mengundang para penyedia jasa untuk berkoordinasi dan menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan administrasi pekerjaan.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.
3. merencanakan kembali pekerjaan yang tertunda di tahun berikutnya.

CAPAIAN KINERJA III
Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh

Tabel. 3.20
Pencapaian Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persentase	8,25%	8,91%	108%

Sumber: Bidang Cipta Karya

Dari Tabel diatas dapat dilihat hasil Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh tahun 2023 oleh DPUPR-PERKIM Kabupaten Malinau, bahwa Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang cipta karya memperoleh capaian Berkurangnya jumlah unit RTLH Tahun 2023 adalah sebesar 108% Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahunan 2023 dengan tahun sebelumnya dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel. 3.21
Perbandingan Antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun.....		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persentase	8,91%	-	-	8%	-	-	89,78%

Sumber: Bidang Cipta Karya

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya adalah perbandingan realisasi Berkurangnya jumlah unit RTLH tahun 2023 sebesar 8,91% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 8% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 11,37% terhadap capaian tahun 2023. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel. 3.22
Perbandingan Antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun.....		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persentase	8,91%	-	-	8%	-	-	89,78%

Sumber: Bidang Cipta Karya

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya adalah perbandingan realisasi Berkurangnya jumlah unit RTLH tahun 2023 sebesar 8,91% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 8% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 0,89% terhadap capaian tahun 2023. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut

Tabel. 3.23
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
Berkurangnya jumlah unit RTLH	persentase	8,91%	9%	99%

Sumber: Bidang Cipta Karya

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Rasio rumah layak huni tahun 2023 sebesar 99% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 9% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 8,91% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023

1. Dibandingkan dengan Standar Nasional

Dibandingkan dengan target nasional yang terdapat dalam Permen Pekerjaan Umum No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Berkurangnya jumlah unit RTLH tidak termasuk di dalamnya.

Tabel. 3.24
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS-3 Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh				
IKSS	Berkurangnya jumlah unit RTLH	8,25%	8,91%	108%
SP Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				
IKSP	Persentase rumah tangga yang mendapat pengembangan rumah	100%	44,12%	44,12%

Sumber: Bidang Cipta Karya

RENSTRA Tahun 2021-2026, target indikator kinerja “Berkurangnya jumlah unit RTLH” pada tahun 2023 adalah 8,25% Pada tahun 2023 Persentase rumah tangga yang mendapat pengembangan yang dicapai oleh DPU-PR.PERKIM senilai 8,91% dengan capaian kinerja sebesar 108%

Data tersebut disajikan berdasarkan hasil pengumpulan data dari pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan dan sifatnya bukan kumulatif terhadap tahun-tahun sebelumnya sehingga menghasilkan data yang hanya berdasarkan tahun anggaran berjalan tersebut yakni tahun 2023. Capaian kinerja untuk Sasaran Strategis 3 dapat diukur berdasarkan tabel 3.6 berikut :

Tabel. 3.25
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN
1.	Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100$ $= \frac{46}{16.405} \times 100$ $= 108\%$

Sumber : Bidang Cipta Karya

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dapat tercapai melalui pencapaian program dan didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023 capaian dari output kegiatan tersebut. Sasaran Strategis “Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha ” didukung oleh s asaran Program “Persentase rumah tangga yang mendapat pengembangan rumah ” yang diukur dengan menggunakan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program, yaitu:

IKSP: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Target IKSP ini pada tahun 2023 adalah 8,25%. Bidang Cipta Karya pada akhir tahun 2023 mencapai Persentase rumah tangga yang mendapat pengembangan rumah sebesar 8,91% dengan capaian kinerja sebesar 108% dari target, dimana tidak terdapat gap dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut merupakan hasil realisasi terhadap target pada tahun berjalan yakni tahun 2023. Berdasarkan data penyelenggaraan rumah layak huni kegiatan yang terlaksana terkait dukungan akses masyarakat terhadap kualitas kawasan permukiman kumuh hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.26 Capaian Kinerja Sasaran Program 3

Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Kegiatan	Ket.
Perbaikan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Renovasi Rumah Tidak Layak Huni	Kec. Malinau Kota, Malinau Utara, Mentarang, Malinau Selatan Hilir	a.Pekerjaan Lantai b.Pekerjaan Sanitasi c.Pekerjaan Atap d.Pekerjaan Dinding e.Pekerjaan Pondasi	Tercapai

Sumber : Bidang Cipta Karya

Berdasarkan hasil tabel di atas tampak bahwa Bidang Cipta Karya mampu melaksanakan sasaran strategis tersebut dengan baik sesuai target yang telah ditentukan.

Capaian ini menunjukkan hasil kerja keras seluruh personil Dinas PUPR-PERKIM dalam rangka mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan sesuai dengan Misi Kepala Daerah

Kabupaten Malinau, dan hal ini terjadi karena dilakukan beberapa upaya percepatan mulai dari pemrograman hingga pelaksanaan, meliputi :

1. Dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah yakni APBD
2. Komitmen dan penekanan pimpinan DPU-PR.PERKIM untuk melakukan strategi percepatan pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing PPK/PPTK
3. Dukungan penggunaan Sistem SPSE (sistem pengadaan secara elektronik) yang dapat membantu POKJA dalam pelaksanaan proses pelelangan
4. Kerjasama & koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders

Berikut dokumentasi dari beberapa output Sasaran Program “Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh”: Berikut dokumentasi dari beberapa output Sasaran Program “Renovasi Rumah Tidak Layak Huni”:

1. IKSP : Perbaikan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni



Gambar 3.43 Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

Renovasi Rumah Tidak Layak Huni termasuk ke dalam Penyelenggaraan meningkatkan hunian yang layak untuk kawasan kumuh tahun 2023, Tertanggal 30 November 2023 dengan Nomor SPK: 479/PPK/E.KATALOG-RTLH/CK masa pekerjaan selama 30 hari. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp 37.594.222-. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,69% atau senilai Rp 37.594.222,-.

2. IKSP : Perbaikan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni



Gambar 3.44 Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

Renovasi Rumah Tidak Layak Huni termasuk ke dalam Penyelenggaraan meningkatkan hunian yang layak untuk kawasan kumuh tahun 2023, Tertanggal 30 November 2023 dengan Nomor SPK: 479/PPK/E.KATALOG-RTLH/CK masa pekerjaan selama 30 hari. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp 37.594.222-. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,61% atau senilai Rp 37.594.222,-.

3. IKSP : Perbaikan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni



Gambar 3.45 Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

Renovasi Rumah Tidak Layak Huni termasuk ke dalam Penyelenggaraan meningkatkan hunian yang layak untuk kawasan kumuh tahun 2023, Tertanggal 30 November 2023 dengan Nomor SPK: 479/PPK/E.KATALOG-RTLH/CK masa pekerjaan selama 30 hari. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp 37.594.222-. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 99,61% atau senilai Rp 37.594.222,-.

Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya Bidang Cipta Karya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.



Berdasarkan diagram di atas, tampak bahwa rencana pagu anggaran pada Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan rencana pagu anggaran Tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian

anggaran Dinas PUPR-PERKIM bidang cipta karya sehingga terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 4.079.860.475 yakni menjadi Rp 2.920.000.000 atau sekitar 2,39%. Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran kisaran 57,84% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.340.775.000.

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Efisiensi SDM khususnya SDM Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S2 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 3

Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh untuk capaian indikator ketiga yaitu Berkurangnya jumlah unit RTLH yaitu sebesar 7,13% dari target RPJMD dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami peningkatan dengan realisasi 8,91 Adapun faktor mendukung keberhasilan, hambatan dan tidak lanjut pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut.

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi selesai tepat waktu
2. Pemilihan penyedia jasa konsultasi dan konstruksi yang tepat karena mengikuti metode pemilihan yang dianjurkan oleh Unit Layanan Pengadaan atau LPSE.
3. Dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga mampu merekam kejadian/permasalahan yang dihadapi serta penanganannya.
4. Tersedianya SDM yang kompeten.
5. Tersedianya anggaran dari Pemerintah Daerah melalui APBD Murni
6. Komitmen dan penekanan pimpinan DPU-PR.PERKIM untuk melakukan strategi percepatan pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing PPK/PPTK.
7. Kerjasama & koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders.

Hambatan :

1. Kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada pekerjaan fisik di lapangan
2. Kondisi dilapangan kadang dapat mengalami perubahan rencana

Tindak Lanjut :

1. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.

CAPAIAN KINERJA IV
Meningkatnya Infrastruktur Sumber Air Minum Layak

Tabel. 3.27
Pencapaian Sasaran 4

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persentase	40%	81,84%	204,6%

Sumber: Bidang Cipta Karya

Dari Tabel diatas dapat dilihat hasil Meningkatnya infrastruktur sumber air minum layak tahun 2023 oleh DPU PR PERKIM Kabupaten Malinau, bahwa Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang cipta karya memperoleh capaian persentase rumah tangga yang terlayani air bersih Tahun 2023 adalah sebesar 204,6% Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahunan 2023 dengan realisasi tahun sebelumnya dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel. 3.28
Perbandingan Antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun.....		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persentase	81,84%	78,31%	100%	78,83%	0,99%	1,26%	117,66%

Sumber: Bidang Cipta Karya

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 adalah perbandingan realisasi Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih tahun 2023 sebesar 81,84% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 78,83 maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 1,03% terhadap capaian tahun 2022. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat

dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel. 3.29
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persentase	81,84%	100 %	1,22 %

Sumber: Bidang Cipta Karya

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan nilai evaluasi tahun 2023 sebesar 81,84% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100% Maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian nilai evaluasi sebesar 1,22% Terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

1. Dibandingkan dengan Standar Nasional

Dibandingkan dengan target nasional yang terdapat dalam Permen Pekerjaan Umum No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Bidang Pekerjaan Umum Jenis pelayanan dasar SPM bidang Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang meliputi Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari. Target capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2023 pada jenis pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari dalam indikator program yaitu persentase rumah tangga yang terlayani air bersih dengan standar pusat tercapai 100% dari target daerah dan di tahun 2023 telah tercapai 81,84% dari target 40%.

Tabel. 3.30 Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS-3 Meningkatnya infrastruktur air minum layak				
IKSS	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	40%	81,84%	204,6%
SP Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan (JP)				
IKSP-1	Persentase Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	100	100	100%

Berdasarkan dokumen RENSTRA Tahun 2021-2026, target indikator kinerja “Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih” pada tahun 2023 adalah 40% Pada tahun 2023 Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak yang dicapai oleh DPU-PR.PERKIM senilai 81,84% dengan capaian kinerja sebesar 204,6% dimana mampu mencapai target sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Data tersebut disajikan berdasarkan hasil pengumpulan data dari pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan dan sifatnya bukan kumulatif terhadap tahun-tahun sebelumnya sehingga menghasilkan data yang hanya berdasarkan tahun anggaran berjalan tersebut yakni tahun 2023. Capaian kinerja untuk Sasaran Strategis 3 dapat diukur berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3.31 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN
1.	Meningkatnya Infrastruktur air minum layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota $\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut}} \times 100$ $= \frac{16.332}{19.956} \times 100$ $= 81,84\%$

Sumber: Bidang Cipta Karya

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dapat tercapai melalui pencapaian program dan didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023 capaian dari output kegiatan tersebut. Sasaran Strategis “Meningkatnya infrastruktur sumber air minum layak ” didukung oleh Program “Persentase rumah tangga yang terlayani SPAM JP” yang diukur dengan menggunakan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program, yaitu:

IKSP: Persentase Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Target IKSP ini pada tahun 2023 adalah 40%. Bidang Cipta Karya pada akhir tahun 2023 mencapai persentase rumah tangga yang terlayani SPAM JP sebesar 81,84% dengan capaian kinerja sebesar 204,6% dari target, dimana tidak terdapat gap dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut merupakan hasil realisasi terhadap target pada tahun berjalan yakni tahun 2023. Berdasarkan data penyelenggaraan SPAM, kegiatan yang terlaksana terkait dukungan akses masyarakat terhadap air minum layak hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32 Capaian Kinerja Sasaran Program IV

Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Kegiatan	Ket.
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Pemukiman Sengayan arah Desa Sesua, Desa Malinau Hulu	Malinau Kota	ekerjaan Pipa dan Galian b. Pengadaan dan Pemasangan aksesoris pipa HDPE	Tercapai
	Pembangunan Jaringan Air Bersih (SPAM) Kabiran	Malinau Kota	a. Pekerjaan Pipa dan Galian ekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Unit Perlengkapan	Tercapai
	Pembangunan Jaringan Air Bersih belakang Christian Center	Malinau Kota	ekerjaan Pipa dan Galian ekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Unit Perlengkapan	Tercapai
	Pembangunan jaringan air minum desa sesua RT 3	Malinau Barat	a. Pekerjaan Pipa Dan Galian b. Pengadaan Dan Pemasangan Unit Perlengkapan c. Pekerjaan Tanah & Pas. Batu Gunung Jembatan Pipa d. Pekerjaan Konstruksi Jembatan Pipa	Tercapai
	Pembangunan Jaringan Air Bersih Jl. Poros Tanjung Lapang, RT. 2	Malinau Barat	a. Pekerjaan Pipa dan Galian b. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Unit Perlengkapan	Tercapai
	Pembangunan Air Bersih (SPAM) Lokus Stunting	Kayan Selatan	a. Pekerjaan Pipa dan Galian b. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Unit Perlengkapan	Tercapai
	Rehab IPA Kuala Lapang	Malinau Barat	ekerjaan Tanah dan Pasir ekerjaan Pondasi ekerjaan Struktur Beton ekerjaan Kolom-Atap Rangka Baja WF ekerjaan Lain-lain	Tercapai
	Pembangunan Instalasi Air Bersih dan Sanitasi Rumah Dinas dan Guest House Bupati	Malinau Kota	ekerjaan Pipa dan Galian ekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Unit Perlengkapan	Tercapai
	Pembangunan IPA Tanjung Nanga	Malinau Selatan Hulu	ekerjaan Pipa dan Galian ekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Unit Perlengkapan	Tercapai
	Pemasangan Jaringan PDAM di Jalan Swadaya Lidung Keminci	Mentarang	ekerjaan Pipa dan Galian b. Pengadaan dan Pemasangan aksesoris pipa HDPE	Tercapai
	Revitalisasi IPA PDAM Kuala Lapang	Malinau Barat	Pekerjaan Paket IPA Fiberglass Kapasitas 40 Lps ekerjaan Lain-lain	Tercapai

	Pembangunan Air Bersih (SPAM) Dusun Rajuk RT. 4 Desa Paking	Kayan Selatan	Pekerjaan Tanah Pekerjaan Pondasi Pekerjaan Beton Struktur Pekerjaan Dinding Bangunan Pekerjaan Finishing	Tercapai
--	---	---------------	---	----------

Sumber : Bidang Cipta Karya

Pelaksanaan dari kegiatan penyelenggaraan SPAM tersebut telah meningkatkan jumlah pelayanan air minum layak sebanyak 600 SR. Berikut tabel pelayanan air minum layak melalui kegiatan SPAM.

Tabel. 3.33 Pelayanan Masyarakat Terhadap Akses Air Minum Layak

No	Output	Panjang Pipa (Meter)	Sambungan Rumah*	Jiwa Terlayani**	Proyeksi Penduduk (2022)***
1.	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	6400	850	3400	81.243
2.	Pembangunan IPA	800	100	400	
3.	Pembangunan Air Bersih SPAM	3100	652	2608	

Sumber : Bidang Cipta Karya

Keterangan :

*1 SR = 1 KK

**Asumsi 1 KK = 4 Jiwa

***Data Proyeksi Penduduk, sumber data DUKCAPIL

Berdasarkan hasil tabel perbandingan kinerja di atas tampak bahwa Bidang Cipta Karya mampu melaksanakan sasaran strategis tersebut dengan baik sesuai target yang telah ditentukan. Capaian ini menunjukkan hasil kerja keras seluruh personil Dinas PUPR-PERKIM dalam rangka mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan sesuai dengan Misi Kepala Daerah Kabupaten Malinau, dan hal ini terjadi karena dilakukan beberapa upaya percepatan mulai dari pemrograman hingga pelaksanaan, meliputi :

1. Dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah yakni APBD
2. Penyiapan dokumen *readiness criteria* (dokumen perencanaan teknis, DED, RAB yang dilakukan pada tahun sebelumnya
3. Komitmen dan penekanan pimpinan DPU-PR.PERKIM untuk melakukan strategi percepatan pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing PPK/PPTK
4. Dukungan penggunaan Sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dapat membantu POKJA dalam pelaksanaan proses pelelangan
5. Dukungan sistem *e-Monitoring Online* yang sangat membantu dan mendukung pemantauan progres pelaksanaan kegiatan di lapangan.
6. Kerjasama & koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders

Berikut dokumentasi dari beberapa output Sasaran Program “Meningkatnya Ketersediaan Air Bersih dan Air Minum”.

1. IKSP-1 : Pembangunan Jaringan Air Bersih



Gambar 3.46 Pembangunan Jaringan Air Bersih di Pemukiman Sengayan arah Desa Sesua

Pembangunan Jaringan Air Bersih di Pemukiman Sengayan arah Desa Sesua, Desa Malinau Hulu termasuk ke dalam Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan yang dilaksanakan secara swakelola tahun 2023, tertanggal SK 10 Maret 2023 dengan 223/PPK/KONTRAK-KONTS.PJABP SENGAYAN/CK masa pekerjaan selama 90 hari. Total anggaran Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Long Lame sebesar Rp 633.367.000,-. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 100% atau senilai Rp 729,178,500.00,-

2. IKSP-1 : Pembangunan Jaringan Air Bersih



Gambar 3.47 Pembangunan Jaringan Air Bersih (SPAM) Kabiran Sesua

Pembangunan Jaringan Air Bersih (SPAM) Kabiran termasuk ke dalam Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan yang dilaksanakan tahun 2023, tertanggal 19 September 2023 dengan Nomor 254/PPK/KONTRAK-KONST.JABKABIRAN/CK masa pekerjaan selama 90 hari. Total anggaran Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Sungai Anai sebesar Rp 1.500.000.000- Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi keuangan mencapai 99,96% atau senilai Rp 1,793,206,006.00,-.

3. IKSP-1 : Pembangunan Jaringan Air Bersih



Gambar 3.48 Pengembangan Jaringan Pembangunan Jaringan Air Bersih belakang Christian Center

Pengembangan Jaringan Pembangunan Jaringan Air Bersih belakang Christian Center ini termasuk ke dalam Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan yang dilaksanakan secara swakelola tahun 2023, tertanggal SK 29 September 2023 dengan Nomor Kontrak 272/PPK/KONTRAK-KONST.PJABBCC/CK masa pekerjaan selama 80 hari. Total anggaran Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Metun sebesar Rp 699.999.992- Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi keuangan mencapai 88,73% atau senilai Rp 621,084,300.00-.

4. IKSP-1 : Pembangunan Jaringan Air Bersih



Gambar 3.49 Pembangunan jaringan air minum desa sesua RT 3

Pembangunan jaringan air minum desa sesua RT 3 termasuk ke dalam Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan yang dilaksanakan secara swakelola tahun 2023, tertanggal SK 19 September 2023 dengan Nomor Kontrak 257/PPK/KONTRAK-KONST.PJAMDSESUART.3/CK masa pekerjaan selama 270 hari. Pembangunan jaringan air minum desa sesua RT 3 sebesar Rp 800.000.000- Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 91,00% atau senilai Rp 728,032,000.00-.

5. IKSP-1 : Pembangunan Jaringan Air Bersih



Gambar 3.50 Pembangunan Jaringan Air Bersih Jl. Poros Tanjung Lapang, RT. 2

Pembangunan Jaringan Air Bersih Jl. Poros Tanjung Lapang, RT. 2 termasuk ke dalam Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan yang dilaksanakan secara swakelola tahun 2023, tertanggal SK 4 Oktober 2023 dengan Nomor SPK: 278/PPK/KONTRAK/KONS.PJABJPG LAPANGAN/CK masa pekerjaan selama 80 hari. Pembangunan Jaringan Air Bersih Jl. Poros Tanjung Lapang, RT. 2 sebesar Rp 749.990.000-. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 91,32 atau senilai Rp 684,906,500.00-.

6. IKSP-1 : Pembangunan Jaringan Air Bersih



Gambar 3.51 Rehab IPA Kuala Lapang

Rehab IPA Kuala Lapang termasuk ke dalam Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan yang dilaksanakan secara swakelola tahun 2023, tertanggal SK 10 Oktober 2023 dengan Nomor SPK: 284/PPK/KONTRAK-KONST.RIPAKLAPANG/CK masa pekerjaan selama 75 hari. Total anggaran Rehab IPA Kuala Lapang sebesar Rp 875.783.000-. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 98,13% atau senilai Rp 684,123,100.00

7. IKSP-1 : Pembangunan Jaringan Air Bersih



Gambar 3.52 Pembangunan Air Bersih (SPAM) Desa Long Aran

Pembangunan Air Bersih (SPAM) Desa long aran termasuk ke dalam Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan yang dilaksanakan secara swakelola tahun 2023, tertanggal SK 29 September 2023 dengan Nomor SPK 245/PPK/KONTRAK-KONST.PABSPAMDLG.ALAN/CK masa pekerjaan selama 80 hari. Pembangunan Air Bersih (SPAM) Desa long aran sebesar Rp 762.991.000-. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 76,55% atau senilai Rp 765,541,000.00.

8. IKSP-1 : Pembangunan Jaringan Air Bersih



Gambar 3.53 Pembangunan IPA Tanjung Nanga

Pembangunan IPA Tanjung Nanga termasuk ke dalam Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan yang dilaksanakan tahun 2023, tertanggal SK 09 September 2023 dengan Nomor SPK 357/PPK/KONTRAK-KONTS.PIPA.TNANGA/CK masa pekerjaan selama 65 hari. Total anggaran Pembangunan IPA Tanjung Nanga Barat sebesar Rp 5.999.990.620. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 70% atau senilai Rp 4,200,292,300.00.

9. IKSP-2 : Pembangunan Jaringan Air Bersih



Gambar 3.54 Pemasangan Jaringan PDAM di Jalan Swadaya Lidung Keminci

Pemasangan Jaringan PDAM di Jalan Swadaya Lidung Keminci termasuk ke dalam Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan yang dilaksanakan tahun 2023, tertanggal SK 9 November 2023 dengan Nomor Kontrak 551/PPK/KONTRAK-KONST.PJPDAMKEMENCI/CK masa pekerjaan selama 50 hari kalender. Total anggaran Pemasangan Jaringan PDAM di Jalan Swadaya Lidung Keminci sebesar Rp 699.999.800. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 90% atau senilai Rp 633,808,500.00.

10. IKSP-1 : Pembangunan Jaringan Air Bersih



Gambar 3.55 Revitalisasi IPA PDAM Kuala Lapang

Revitalisasi IPA PDAM Kuala Lapang termasuk ke dalam Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan yang dilaksanakan tahun 2023, tertanggal SK 14 November 2023 dengan Nomor Kontrak 551/PPK/KONTRAK-KONST.PJPDAMKEMENCI/CK masa pekerjaan selama 45 hari kalender. Total anggaran Revitalisasi IPA PDAM Kuala Lapang sebesar Rp 4.000.000.000. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 33% atau senilai Rp 1,339,214,000.00

11. IKSP-1 : Pembangunan Jaringan Air Bersih



Gambar 3.56 Pembangunan Air Bersih (SPAM) Dusun Rajuk RT. 4 Desa Paking

Pembangunan Air Bersih (SPAM) Dusun Rajuk RT. 4 Desa Paking termasuk ke dalam Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan yang dilaksanakan tahun 2023, tertanggal SK 21 November 2023 dengan Nomor Kontrak 554/PPK/KONTRAK-KONST.PSPAMRAJUKRT4/CK masa pekerjaan selama 35 hari kalender. Total anggaran Pembangunan Air Bersih (SPAM) Dusun Rajuk RT. 4 Desa Paking sebesar Rp 400.000.000. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 72,35% atau senilai Rp 289,397,200.00.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.



Berdasarkan diagram di atas, tampak bahwa rencana pagu anggaran pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan rencana pagu anggaran Tahun 2023. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan APBD Kabupaten Malinau untuk Dinas PUPR-PERKIM bidang cipta karya sehingga terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 300.000.000,00 yakni dari pagu Rp 11.697.625.400,00 menjadi Rp

11.997.625.400,00 atau sekitar 1,02%. Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran kisaran 98,61% dengan sisa anggaran sebesar Rp 175.314.111,00.

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Efisiensi SDM khususnya SDM Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S2 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 4

Akses Air Minum Layak; untuk capaian indikator kedua yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak yaitu sebesar 40% dan dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami peningkatan dengan realisasi 81,84%. Adapun faktor mendukung keberhasilan, hambatan dan tidak lanjut sebagai berikut :

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi di wilayah selesai tepat waktu, bahkan ada yang lebih cepat dari jadwal pelaksanaan pekerjaan
2. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dan konstruksi yang tepat karena mengikuti metode pemilihan yang dianjurkan oleh Unit Layanan Pengadaan atau LPSE.
3. Dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga mampu merekam kejadian
4. Tersedianya SDM yang kompeten.
5. Tersedianya anggaran dari Pemerintah Daerah melalui APBD Murni
6. Komitmen dan penekanan pimpinan DPU-PR.PERKIM untuk melakukan strategi percepatan pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing PPK/PPTK.
7. Kerjasama & koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders.

Hambatan :

1. Kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada pekerjaan fisik di lapangan

Tindak Lanjut :

1. Mengundang para penyedia jasa untuk berkoordinasi dan menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan administrasi pekerjaan.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.
3. Evaluasi rutin bersama

CAPAIAN KINERJA V

Tabel. 3.34

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi
Pencapaian Sasaran 5

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase	0,56	49,06%	87,61%

Dari tabel diatas dapat dilihat meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi tahun 2023 bahwa Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Sumber Daya Air memperoleh capaian Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2023 adalah 87,61%. Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahunan 2023 dengan tahun sebelumnya dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel. 3.35
Perbandingan Antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun.....		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase	49,06%	-	-	23,87	-	-	85,20

Sumber: Bidang Sumber Daya Air

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 adalah perbandingan realisasi Persentase Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2023 sebesar 49,06% dengan realisasi tahun 2022 sebesar 23,87% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 4,68% terhadap capaian tahun 2022. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel. 3.36

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2026
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase	49,06 %	2,27 %	21,61%

Sumber: Bidang Sumber Daya Air

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan nilai evaluasi tahun 2023 sebesar 49,06% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 2,27% Maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 persentase capaian nilai evaluasi sebesar 21,61% Terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Regional Provinsi dan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Regional Provinsi	Standar Nasional	Capaian Kinerja (%)	
						Provinsi	Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi	Rasio Jaringan Irigasi	Tahun	49,06%	61,39%	-	79,92%	-

Sumber : DPUPR PERKIM Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan regional provinsi tahun 2023 adalah perbandingan rasio jaringan irigasi tahun 2023 sebesar 49,06 tahun dengan realisasi regional provinsi tahun 2023 sebesar 61,39%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2023 sebesar 79,92% terhadap regional provinsi tahun 2023.

Tabel. 3.37
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja			Target	Realisasi
SS-3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				
IKSS	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	0,56	49,06%	87,61%
SP Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder				
IKSP-1	Persentase Luas Irigasi Yang Terbangun	100	97,5%	87,5%

Sumber : Bidang Sumber Daya Air

Berdasarkan dokumen RENSTRA Tahun 2021-2026, target indikator kinerja “Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik” pada tahun 2023 adalah 0,56% Pada tahun 2022 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik yang dicapai oleh DPU-PR.PERKIM senilai 49,06% dengan capaian kinerja sebesar 87,61%, dimana mampu mencapai target lebih sebesar dari target yang ditetapkan.

Data tersebut disajikan berdasarkan hasil pengumpulan data dari pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan dan sifatnya bukan kumulatif terhadap tahun-tahun sebelumnya sehingga menghasilkan data yang hanya berdasarkan tahun anggaran berjalan tersebut yakni tahun 2023. Capaian Kinerja Untuk Sasaran Strategis III dapat diukur sebagai berikut:

Tabel. 3.38
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting $\frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota}} \times 100$ $= \frac{1.890 \text{ (Ha)}}{3.852 \text{ (Ha)}} \times 100$ $= 49,06\%$

Sumber : Bidang Sumber Daya Air

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dapat tercapai melalui pencapaian program dan didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023 capaian dari output kegiatan tersebut. Sasaran Strategis “Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder” didukung oleh sasaran Program “Persentase luas irigasi yang terbangun” yang diukur dengan menggunakan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program, yaitu:

IKSP: Persentase Luas Irigasi Yang Terbangun

Target IKSP ini pada tahun 2023 adalah 100%. Bidang Sumber Daya Air pada akhir tahun 2023 mencapai persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 87,61% dari target, dimana tidak terdapat gap dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut merupakan hasil realisasi terhadap target pada tahun berjalan yakni tahun 2023. Berdasarkan data Pengelolaan Daya Air, kegiatan yang terlaksana tersebut yaitu hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Sasaran Program III

Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi	Ket.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi Kuala Lapang	Malinau Barat	Pembangunan Saluran Primer dan Sekunde, Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE	Tercapai
	Pembangunan Jaringan Irigasi Malinau Seberang	Malinau Utara	Pembangunan Saluran Primer dan Sekunde, Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE	Tercapai
	Pembangunan Jaringan Irigasi Tanjung Lapang	Malinau Barat	Pembangunan Saluran Primer dan Sekunde, Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE	Tercapai

Sumber : Bidang Sumber Daya Air

Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Jaringan Irigasi tersebut telah meningkatkan dalam rangka mendukung sasaran strategis V “Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik” melalui “Program Pengelolaan Sumber Daya Air”.

1. IKSP-3: Peresentase Luas Irigasi yang dibangun



Gambar 3.57 Pembangunan Jaringan Irigasi Kuala Lapang

Pembangunan Jaringan Irigasi Kuala Lapang termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak tahun 2023, dengan nomor kontrak: 611/658/3.B/PPK-KONTRAK/SDA/2023 tertanggal kontrak 27 Juni 2023 dengan masa pekerjaan selama 180 hari dan rencana FHO pada 27 Desember 2023. Total anggaran Pembangunan Jaringan Irigasi Kuala Lapang sebesar Rp 1.036.506.463-. Pekerjaan Tanah (Galian Saluran Primer dan Sekunder, Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 84,52% atau senilai Rp 876,050,765.00-.

2. **IKSP-3: Peresentase Luas Irigasi yang dibangun**



Gambar 3.58 Pembangunan Jaringan Irigasi Malinau Seberang

Pembangunan Jaringan Irigasi Malinau Seberang termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak tahun 2023, dengan nomor kontrak: 611/658/4.B/PPK-KONTRAK/SDA/2023 tertanggal kontrak 27 Juni 2023 dengan masa pekerjaan selama 180 hari dan rencana FHO pada 27 Desember 2023. Total anggaran Pembangunan Jaringan Irigasi Malinau Seberang sebesar Rp 999.999.786-. Pekerjaan Tanah (Galian Saluran Primer dan Sekunde, Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 91,78% atau senilai Rp 917,755,200.00-.

3. **IKSP-3: Peresentase Luas Irigasi yang dibangun**



Gambar 3.59 Pembangunan Jaringan Irigasi Tanjung Lapang

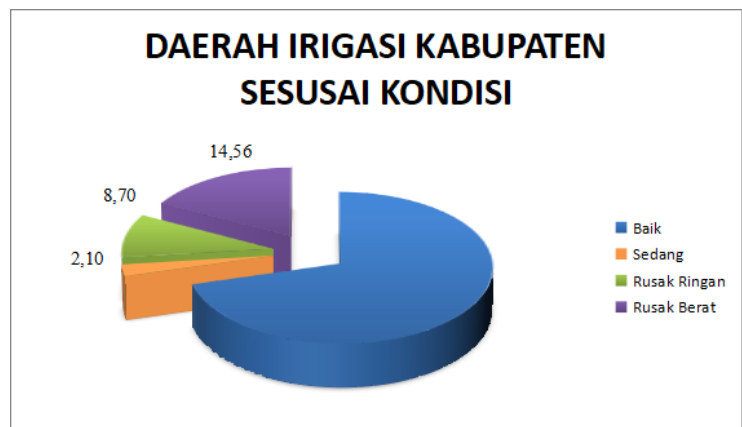
Pembangunan Jaringan Irigasi Tanjung Lapang termasuk ke dalam paket infrastruktur yang dilaksanakan melalui kontrak tahun 2023, dengan nomor kontrak: 611/658/9.B/PPK-KONTRAK/SDA/2023 tertanggal kontrak 14 Juli 2023 dengan masa pekerjaan selama 171 hari dan rencana FHO pada 31 Desember 2023. Total anggaran Pembangunan Jaringan Irigasi Tanjung Lapang sebesar Rp 1.999.999.711-. Pekerjaan Tanah (Galian Saluran Primer dan Sekunde, Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE. Realisasi fisik pekerjaan ini pada tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi anggaran mencapai 93,86% atau senilai Rp 1,877,152,826.00-.

Tabel 3.40
Kondisi Irigasi Kabupaten Malinau Tahun 2023

NO	URAIAN	KONDISI IRIGASI KABUPATEN MALINAU 2023
		Luas(Ha)
I	DAERAH IRIGASI KABUPATEN	2850
1	A. Baik	59,47
2	B. Sedang	2,10
3	C. Rusak Ringan	8,07
4	D. Rusak Berat	14,56

Sumber : Bidang Suber Daya Air

Capaian ini menunjukkan hasil kerja keras seluruh personil Dinas PUPR-PERKIM dalam rangka mewujudkan Infrastruktur Irigasi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan sesuai dengan Misi Kepala Daerah Kabupaten Malinau, dan hal ini terjadi karena dilakukan beberapa upaya percepatan mulai dari pemrograman hingga pelaksanaan.



Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya Bidang Sumber Daya Air

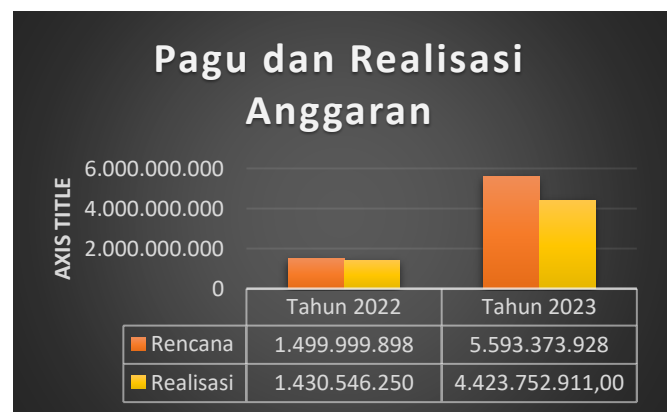
Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.



Berdasarkan diagram di atas, tampak bahwa rencana pagu anggaran pada Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan pagu anggaran Tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan APBD Kabupaten Malinau untuk Dinas PUPR-PERKIM bidang sumber daya air sehingga terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 4.093.374.030 atau sekitar 3,72%. Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran kisaran 79,09% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.169.621.017-.

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Efisiensi SDM khususnya SDM Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S2 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 5

Sumber Daya Air, Prasarana Sumber Daya Air yang ada di Kabupaten Malinau pada tahun 2023 mampu meningkatkan infrastruktur irigasi sebagai dukungan ketahanan air bagi pertanian. Target Kinerja Irigasi tahun 2023 sebesar 0,56% target realisasi mengalami kenaikan menjadi 49,06% yang disebabkan pemeliharaan rutin jaringan irigasi dan penanganan jaringan irigasi pada daerah kewenangan kabupaten. Adapun faktor mendukung keberhasilan, hambatan dan tidak lanjut sebagai berikut :

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi jalan di wilayah selesai tepat waktu, bahkan ada yang lebih cepat dari jadwal pelaksanaan pekerjaan
2. Pemilihan penyedia jasa konsultasi dan konstruksi yang tepat karena mengikuti metode pemilihan yang dianjurkan oleh Unit Layanan Pengadaan atau LPSE.
3. Dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga mampu merekam kejadian/permasalahan yang dihadapi serta penanganannya.
4. Tersedianya SDM yang kompeten.
5. Tersedianya anggaran dari Pemerintah Daerah melalui APBD Murni
6. Komitmen dan penekanan pimpinan DPU-PR.PERKIM untuk melakukan strategi percepatan pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing PPK/PPTK.
7. Kerjasama & koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders.

Hambatan :

1. Kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada pekerjaan fisik di lapangan
2. Kondisi dilapangan kadang dapat mengalami perubahan rencana

Tindak Lanjut :

1. Meningkatkan Pengelolaan sumber daya air
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.
3. merencanakan kembali pekerjaan yang tertunda di tahun berikutnya.

1. Realisasi Anggaran

Salah satu sumber daya dari suatu organisasi adalah sumber daya keuangan. Pada tahun 2023, seperti yang dijelaskan pada BAB II, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau mendapatkan total alokasi dana pada DPA Awal Rp 424.712.508.980,00-. dengan progres 80,88% atau senilai Rp 337.021.269.899,00-. Untuk alokasi anggaran per sasaran strategis PD telah dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis Ke – 1

Sasaran Strategis “Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan baik di Perkotaan maupun Perdesaan”. Pada Tahun 2023, alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DPA Revisi yaitu sebesar Rp 118.624.273.030,00 dan realisasi anggaran Rp 109.250.607.135,00 dengan progres senilai 92,10%.

Sasaran Strategis Ke - 2

Sasaran strategis “Terwujudnya Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih “. Pada Tahun 2023, alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DPA yaitu sebesar Rp 26.625.380.183,00 dan realisasi anggaran Rp 20.179.739.997,00 dengan progres senilai 75,79%.

Sasaran Strategis Ke - 3

Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi”. Pada Tahun 2023, alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DPA yaitu sebesar Rp 26.617.122.157,00 dan realisasi anggaran Rp 21.033.836.596,00 dengan progres senilai 79,02%.

Sasaran Strategis Ke - 4

Sasaran strategis “Meningkatnya akses terhadap fasilitas sanitasi layak”. Pada Tahun 2023, alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DPA Revisi yaitu sebesar Rp 1.881.765.600,00 dan realisasi anggaran Rp 797.768.944,00 dengan progres senilai 42,39%.

Sasaran Strategis Ke - 5

Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pengembangan permukiman”. Pada Tahun 2023, alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DPA yaitu sebesar Rp 3.180.058.000,00 dan realisasi anggaran Rp 1.839.283.000,00 dengan progres senilai 57,84%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 55 – 57 terkait jenis belanja daerah. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau tahun 2022 hanya memiliki 2 jenis belanja yaitu : a. Belanja Operasi dan b. Belanja Modal.

a. Belanja Operasi

merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Dan dapat dirinci atas jenis:

- belanja pegawai;
- belanja barang dan jasa;
- belanja bunga;
- belanja subsidi;
- belanja hibah; dan
- belanja bantuan sosial.

b. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Alokasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau tahun 2023 sebesar Rp. 424.712.508.980,00,- dengan rincian Belanja Modal sebesar Rp. 291.704.870.381,00 dan Belanja Operasi sebesar Rp. 147.779.326.599,00

Tabel 3.42

Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA	424.712.508.980,00	337.021.269.899,89	80,88
1.	Belanja Modal	291.704.870.381,00	230.859.682.177,00	79,14
2.	Belanja Operasi	147.779.326.599,00	108.021.269.899,00	73,62

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Alokasi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau tahun 2023 sebesar Rp. **424.712.508.980,00** yang telah terealisasi sebesar Rp. **337.021.269.899,89** atau tercapai **80,88 %** terdiri dari belanja Modal dan belanja Operasi. Struktur belanja untuk urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki nilai lebih tinggi untuk alokasi Belanja Operasi jika dibandingkan dengan Belanja Modal Belanja.

Realisasi anggaran Belanja Modal mencapai Rp. 291.704.870.381,00. Anggaran membiayai pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun dan sebagai perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Realisasi anggaran Belanja Operasi mencapai Rp. 230.859.682.177,00 atau 79,14%.

Untuk melihat rincian progres keuangan secara keseluruhan, dapat dilihat pada lampiran rekapitulasi progres keuangan tahun 2023 per Program dan Kegiatan di lingkungan Dinas PUPR-PERKIM berdasarkan data Simda per 31 Desember 2023.

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Malinau, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Kabupaten Malinau. Meskipun disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan para stakeholder dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2023 baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau periode tahun 2023. Pada awal tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pencapaian sasaran strategis dari 5 (lima) indikator kinerja utara dirincikan sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Pencapaian Indikator Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	114.15%
2.	Meningkatnya akses terhadap Permukiman yang layak	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	203,52%
3.	Meningkatnya hunian yang layak untuk kawasan kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	28,6%
4.	Meningkatnya Infrastruktur air minum layak	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	204,6%
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	87,61%
Rata-Rata Capaian Kinerja			127,69%

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kondisi luas wilayah yang sangat besar dan topografi yang berkontur tinggi Kondisi geografis dan persebaran penduduk yang letaknya cukup sulit dijangkau;

2. Kurangnya infrastruktur permukiman yang layak
3. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni di kawasan kumuh
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SPAM
5. Jaringan irigasi belum mengakomodir luas lahan yang ada

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain :

1. Meningkatkan kondisi kualitas jalan dan jembatan.
2. Meningkatkan Pembangunan sarana prasarana perumahan/ permukiman
3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
4. Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
5. Meningkatkan Pengelolaan sumber daya air

Rekomendasi Hasil LHE AKIP

Rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2023 oleh Inspektorat adalah sebagai berikut :

a. Komponen Perencanaan Kinerja :

- 1) Menyusun Crosscutting perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi hubungan kinerja antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.

b. Komponen Pengukuran Kinerja :

- 1). Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja atau Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau terkait pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
- 2). Laporan Pengukuran Kinerja disusun sampai level staf
- 3). Pengukuran kinerja harus menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan serta memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

c. Komponen Pelaporan Kinerja :

- 1). Dokumen laporan menggambarkan kinerja agar dipublikasikan melalui website dan media elektronik
- 2). Dokumen laporan Kinerja agar disampaikan secara tepat waktu
- 3). Dokumen laporan kinerja agar memenuhi standar menggambarkan kualitaas atas pencapaian kinerja. informasi keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya, yaitu :
 - a). Dokumen laporan kinerja harus mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
 - b). Penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi keperdulian seluruh pegawai.

d. Komponen Evaluasi Kinerja Internal :

- 1). Menyusun Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- 2). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan sesuai standar.

- 3). Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau menindaklanjuti rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Komponen Perencanaan Kinerja

- 1). Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau tahun 2024 telah menyusun Crosscutting perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi hubungan kinerja antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan

b. Komponen Pengukuran Kinerja

- 1). Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau telah menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja atau Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau terkait pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
- 2). Laporan Pengukuran Kinerja telah disusun sampai level staf
- 3). Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan serta memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

c. Komponen Pelaporan Kinerja

- 1). Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau tahun 2024 telah membuat laporan menggambarkan kinerja dan dipublikasikan melalui website
- 2). Dokumen laporan Kinerja telah disampaikan secara tepat waktu
- 3). Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya.

d). Komponen Evaluasi Kinerja Internal

- 1). Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau tahun 2024 telah menyusun Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- 2). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan sesuai standar.
- 3). Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau tahun 2024 telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini merupakan wujud kesungguhan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dalam menerapkan *Good Governance* untuk menciptakan *Clean Government* dan meningkatkan kualitas pelayanan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Malinau kepada pihak-pihak terkait baik *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Untuk itu perlu kebersamaan peran dari segenap unsur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dalam rangka mengoptimalkan segala sumber daya yang ada guna mewujudkan capaian kinerja yang lebih meningkat di tahun yang akan datang.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja utama yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Malinau, 31 Januari 2024
Kepala Dinas PUPR PERKIM,

JOSEP, ST., M.M.T
Pembina IV/a
NIP. 19700401 200112 1 002

